

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI
KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASA	
Tgl. Terima	5 - 6 - 1
Asal Dari	Skr W
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	Gratis
No. Inventaris	08
	SKR-509
	SET
	1

Oleh :

S E T I A W A N
E 211 05 022

Digunakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi

Makassar, 2009



ABSTRAK

SETIAWAN (E 211 05 022), Implementasi Kebijakan Industrialisasi Ketenagakerjaan di Kota Makassar, di bimbing oleh Dr. Muhammad Rusdi, M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan yang telah diterapkan pemerintah di Kota Makassar. Selain itu, tujuan lain penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan di Kota Makassar sehingga pemerintah mampu mengevaluasi dalam mengambil tindakan yang tepat.

Penelitian ini dilakukan pada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar selaku pelaksana teknis kebijakan industrialisasi serta para tenaga kerja pada industri manufaktur khususnya industri kecil dan menengah di Kota Makassar. Pemilihan wilayah Kota Makassar tersebut terlebih karena Kota Makassar merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perkembangan industrialisasi yang cukup besar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan beberapa hal yakni : (1). Kebijakan industrialisasi yang telah di buat dan disusun oleh pemerintah yang kemudian diimplementasikan masih dianggap belum optimal. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum mengenal dan mengetahui tentang kebijakan industrialisasi sehingga membuat tenaga kerja hanya bekerja untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya dan sebagian lagi bekerja untuk melanjutkan hidup. Ini sebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah secara langsung kepada tenaga kerja. (2). Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan industrialisasi dalam upaya pengembangan ketenagakerjaan di Kota Makassar. Indikator yang mempengaruhi tersebut antara lain : sumber daya, struktur organisasi, komunikasi dan disposisi (sikap). Dari keempat indikator tersebut di atas, indikator sumber daya merupakan indikator yang paling penting, terutama ketersediaan SDM yang terampil karena betapapun bagus dan sempurnanya suatu kebijakan yang dirancang oleh pembuat kebijakan, tetapi SDM sebagai pelaksana tidak mencukupi dalam segi kuantitas terlebih lagi segi kualitasnya, maka kebijakan tidak akan mampu diimplementasikan secara efektif oleh implementor.



SUMMARY

SETIAWAN (E 211 05 022), Implementation of Policy of Industrialization To labour in Town Macassart, in guiding by Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.

This research aim to know implementation of industrialization policy which has been applied government to labour in Town Macassart. Besides, purpose of other of this research is to know factors influence implementation of policy of industrialization to labour in Town Macassart so that government can evaluate in bringing an action against correct.

This research done at in Departement Industrial, Commerce and Capital Investment of Town Makassar as technical executor of policy of industrialization and the labours at manufacture industry especially middle and small industry in Town Macassart. Audition of Town Macassart region particularly because Town Macassart is center goverment at the same center development of industrialization that is big enough in Prov. South Sulawesi.

From research which has been done writer to conclude some things namely: (1). Policy of industrialization which has in create and compiled by government that is then is implementation that there are still be assumed has not optimal. Still the many labours which has not recognized and knows about policy of industrialization causing makes labour only work for gets money to take care of its(the family and partly again works for continuing life. This causes because lack of governmental socialization directly to labour. (2).Factor influencing implementation of policy of industrialization in the effort expansion labour in Town Macassart. Indicators influencing the is inter alia : resource, organization structure, communications and disposition (position). From fourth of above mentioned indicators, resource indicators is indicators most importantly, especially availability of skillful SDM because after all good and perfectioness of a policy designed by policy maker, but SDM as executor falls short in amount facet particularly its(the quality facet, hence policy will not can be implementation effectively by implementor.

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SETIAWAN

Nim : E 211 05 022

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR" ini, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Dengan kata lain semua isi yang ada dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Makassar, 25 Mei 2009

Yang bertanda tangan,


(SETIAWAN)
E 211 05 022

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI
KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR

Nama : SETIAWAN

Nomor Pokok : E 211 05 022

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Negara



Makassar, 01 Juni 2009

Disetujui oleh :

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sangkala".

Prof. Dr. Sangkala, MA
NIP. 131 961 980

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muhammad Rusdy".

Dr. Muhammad Rusdy, M. Si
NIP. 132 243 719

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI
KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR

Nama : SETIAWAN

Nomor Pokok : E 211 05 022

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Negara

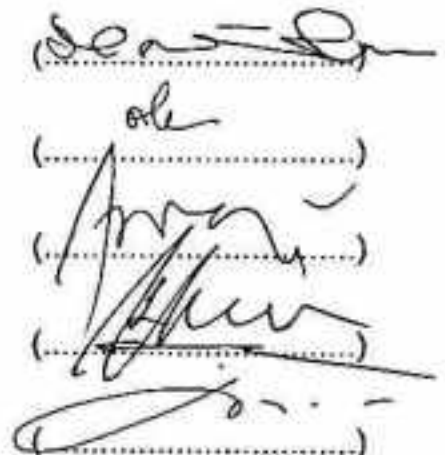
Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Negara pada hari :

TIM EVALUASI

Ketua : Dr. Muhammad Rusdi, M. Si

Sekretaris : Adnan Nasution, S. Sos, M. Si

Anggota : 1. Prof.Dr.H.Sulaiman Asang, M. Si
2. Dr. Haselman, M. Si
3. Drs.H. Muhammad Yunus, MA



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

MOTTO

Jadikanlah Allah sebagai penolongmu dengan sabar dan mengerjakan shalat, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.

(Qs. Albaqarah : 45)

Kita hidup hanya sekali, maka sekiranya ada kebaikan yang bisa kita tunjukkan terhadap sesama, biarlah itu kita lakukan sekarang juga dan jangan menundanya sebab kita tidak akan pernah melewati jalan ini lagi untuk yang kedua kalinya.

(William Pen)

Jangan menunggu keadaan paling ideal, jangan pula menunggu kesempatan yang paling baik. Keduanya tak akan pernah datang.

(Janet Erskine Stuart)

Tiada kesalahan atau kegagalan yang lebih buruk selain berhenti dan tidak mencoba lagi.

(John Wanamaker)

Tak selamanya kegagalan berakhir dengan kesedihan. Ada keajaiban yang akan membuat kita tersenyum.

(Emi)

Kedalaman ilmu tidak diukur dari seberapa tinggi gelar yang kita dapat, tetapi bagaimana ilmu itu kita dapat ajarkan tanpa menganggap rendah orang lain.

(Setiawan)



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas kehidupan penulis hingga pada akhirnya penelitian sampai tersusun skripsi ini dapat dirampungkan. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan nabullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pencerahan bagi umat manusia.

Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini tidak lepas dari fokus permasalahan mengenai implementasi kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan di Kota Makassar. Mengingat implementasi kebijakan industrialisasi tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah tenaga kerja. Penyusunan yang dilakukan didasarkan pada saran dan arahan baik dari pembimbing maupun dari penguji pada saat seminar proposal skripsi.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari jasa-jasa yang tak ternilai baik dari kedua orang tua penulis yakni, Ismail Nganro (ayahanda) dan Ibunda Sitti Rohana atas cinta kasihnya. Saudara-saudara penulis, Kakanda Seniwati S.Sos, M.Hum, Megawati, Irmawati, S.Sos, Budiawan, Darmawan dan Adikku Satriawan serta Bapak Muh. Arif Ganti dan Ibu Sahida yang sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri bersama restu dan doanya yang senantiasa menyiringi langkah penulis. Untuk itu, dengan segala kesadaran dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka.

Penulis juga menyadari bahwa betapa banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan sumbangsih kepada penulis mulai dari awal penelitian sampai penyusunan skripsi ini rampung. Oleh karena itu, tanpa mengenyampingkan peran masing-masing pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. A. Idrus Patturusi selaku Rektor Unhas beserta para Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ketua Jurusan Prof. Dr. Sangkala, M. Si, Dosen-dosen yang telah mendidik penulis dan staf-staf jurusan lainnya : Ibu Haji, Pak Lili, Kak Rini, Kak Amrah dan sebagainya. Serta Penasehat Akademik Bapak Drs. Nelman Edy, M. Si.
4. Bapak Dr. Muhammad Rusdi, M. Si, selaku pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis guna merampungkan skripsi ini.
5. *My best friend* yang selalu bisa menjadi motivasi bagi penulis : Bulqis Istiqamah NMA yang cantik, Bahri Suandi yang gagah dan Dik Osing yang manis, Sauda Purnama.T yang baik hati, Herwin Kurniadi, Burhanuddin, Patricia Y, Ahmad dan Muh, Asri juga tawwa. Terimakasih atas persahabatan, keceriaan, kebahagiaan, semangat dan perhatian yang pernah kalian berikan untukku. Semoga kita selalu bisa bersama selamanya, dan tidak pernah melupakan aku. Kehadiran kalian telah memberikan warna dalam hidupku.



6. Teman-Teman Crew Ksatria 05' dan Ke-Jokers 05' yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas kerjasama, kekompakan, pengertian dan pertolongannya selama ini.
7. Rekan-rekan penulis di BTP Blok J No. 427 yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri : Rachmat Arida Putra, Sutiadi dan Muh. Arifin (Ne') yang senantiasa membantu mempermudah penulis dalam proses penyusunan. Beserta Junaedi, Ridwan, Hamka, Arul dan kanda-kanda senior di Lorong Blok J dan kanda-kanda di SOULAPA.
8. Rekan-rekan penulis yang senantiasa ikut mendoakan penulis dari Desa Mario Kab. Bone : Kak Alimuddin (Senior), Kak Sanawiah, Hasnah, Trix K. Bandri, Iwan dan Andi. Kompak selalu..!!!
9. Terakhir kuingin mengucapkan banyak terimakasih untuk orang-orang yang telah pernah menyakitiku dan membuatku sedih karena kalianlah sekarang aku menjadi lebih kuat dan menjadi lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan tulisan berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 01 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SUMMARY	iii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Implementasi Kebijakan Pemerintah	14
1. Pengertian Kebijakan	14
2. Pengertian Kebijakan Publik	19
3. Pengertian Implementasi Kebijakan	22
B. Konsep Kebijakan Industrialisasi dan Ketenagakerjaan	30
1. Pengertian Industrialisasi	30

2. Pengertian Kebijakan Industrialisasi	36
3. Pengertian Ketenagakerjaan	38
C. Kebijakan Pembangunan Industrialisasi	40
1. Sasaran Kebijakan	40
2. Kebijakan Industrialisasi Terhadap Ketenagakerjaan	41
D. Hipotesis Konseptual	43
E. Kerangka Konseptual	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Jenis Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Informan	47
F. Defenisi Operasional	47
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV GAMBARAN LOKASI	51
A. Profil Wilayah Kota Makassar	51
1. Kondisi Geografis dan Demografis	51
2. Penduduk	55
B. Perindustrian di Kota Makassar	58
C. Instansi Yang Terkait Dalam Kebijakan Industrialisasi	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Implementasi Kebijakan Industrialisasi	64
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Industrialisasi	81

BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta semakin rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industrialisasi, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Atas dasar pemikiran tersebut, industri Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus strategi pembangunan industri pada masa depan adalah membangun daya saing sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik.

Dalam situasi saat ini, untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industrialisasi nasional memerlukan arahan dan proses dari kebijakan yang jelas (<http://www.duto.wordpress.com>). Kebijakan yang mampu menjawab pertanyaan, kemana dan seperti apa bangun industri Indonesia dalam jangka menengah, maupun jangka panjang.

Kebijakan industrialisasi telah tertuang dalam Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang disusun oleh Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Djojohadikusumo dipublikasikan sejak April 1951. RUP merancang "*industri-industri kunci*" yang akan didirikan, meliputi industri pertahanan, kimia dasar, semen, listrik, air minum dan transportasi. Implementasi yang paling nyata diberlakukan oleh pemerintah pada 31 Agustus 1951 yaitu dengan mengeluarkan ketentuan yang lebih memperjelas program industrialisasi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah menjadi penggerak pembangunan, tanpa mengesampingkan pihak swasta.
2. Tujuan dari industrialisasi adalah menyeimbangkan struktur ekonomi, mendayagunakan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan pendapatan nasional.
3. Bentuk dasar industrialisasi adalah bergerak dari industri kecil, menengah dan besar yang mendukung proses pembangunan pedesaan.

<http://images.soemamo.multiply.com/>

Pemerintah juga telah mempersilahkan investasi asing untuk ikut mendukung proses industrialisasi. Perkembangan industrialisasi dan dunia usaha bisnis lainnya di mulai semenjak pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut dunia bisnis di Indonesia mengalami suatu masa keemasan, dimana banyaknya para investor baik asing maupun lokal menanamkan modalnya (<http://images.soemarno.multiply.com/>).

Dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya selanjutnya diperjelas melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 yang dipublikasikan pada 29 Juni 1984). Dalam kebijakan tersebut, juga dijelaskan melalui Keppres. No. 53/1989 tentang pentingnya pembukaan kawasan industri. Dikeluarkannya Keppres. No. 53/1989 lebih terang menjelaskan tentang kemudahan bagi kegiatan industri guna mempercepat pertumbuhan industri (www.sekretariat.negara.RI.co.id). Dalam waktu yang relatif singkat kawasan industri tumbuh di banyak wilayah dengan segenap efek berantai lainnya berupa konversi lahan, misalnya untuk perumahan dan fasilitas lain.

Sebagai pedoman bagi berbagai daerah dalam mengimplementasikan tugasnya maka perlu adanya suatu kebijakan yang menjadi landasan. Selanjutnya kebijakan industrialisasi yang telah diperbaharui ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional. Kebijakan Industri Nasional ini, ditujukan untuk pembangunan industri dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Menurut Hendri F. Isnaeni yang dikutip dalam buku Prof. Mudrajat Kuncoro, Ph. D. berjudul "*Ekonomi Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Maju 2030*" bahwa :

"Industrialisasi dipandang sebagai strategi sekaligus obat bagi banyak negara. Sebagai strategi, industrialisasi dianggap suatu proses linier, yang harus dilalui dengan sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan dalam transformasi struktur ekonomi di banyak negara. Sebagai obat, industrialisasi dipandang ampuh dalam mengatasi masalah keterbelakangan, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran".

Terkait program kebijakan industrialisasi dalam tahun 2009 saat ini, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menilai negatif implementasi dari kebijakan industrialisasi. Terjadinya penyalagunaan wewenang yang dimiliki menjadi sumber dari proses kebijakan industrialisasi di berbagai wilayah dianggap bukan sebagai obat untuk mengatasi masalah keterbelakangan, kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran melainkan sebagai penghambat bagi sebagian masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak berhasil diturunkan sampai ke masyarakat pada tingkat bawah (*grassroot level*) melainkan telah dibajak oleh elit-elit lokal (*elite capture*).

Disadari atau tidak kinerja aparat pemerintahan selama ini belum mampu memberi kepuasan kepada publik. Oleh setiap para kepala daerah/provinsi, hal ini tentunya menjadi sebuah masalah yang harus dicarikan solusi. Dan salah satu daerah yang juga terkena dampaknya adalah Kota Makassar sebagai salah satu wilayah perindustrian yang boleh dikata dalam proses perkembangan. Agenda kebijakan industrialisasi di Kota Makassar yang sebelumnya telah diimplementasikan masih dianggap tidak berpihak pada publik yang dalam hal ini menjadi objek penelitian penulis yaitu terhadap ketenagakerjaan.

Pada level tertentu hal ini membuat situasi ketenagakerjaan gagal dipahami secara utuh. Salah satu contoh kegagalan ini, misalnya, tercermin pada data tentang upah minimum. Menurut data makro, sejak pertengahan tahun 1990-an tingkat rata-rata upah minimum nominal naik terus secara signifikan, yakni dari sekitar di bawah 200 ribuan per bulan pada tahun 1995 menjadi sekitar 1 juta rupiah pada tahun 2007 (Data BPS Tahun 2007 dan telah dikelola oleh Akbar, 2008). Serta merta angka ini bisa diartikan sebagai meningkatnya kesejahteraan buruh tenaga kerja secara keseluruhan. Namun bila dicek sampai pada level individu, data makro tersebut berbicara lain. Di tingkat ini, kesejahteraan buruh sebagai tenaga kerja ternyata cenderung stagnan, bahkan sebagian malah makin miskin.

Masalah ketenagakerjaan juga merupakan salah satu bagian dari masalah nasional yang berkepanjangan dari Pelita ke Pelita. Dalam implementasinya pembangunan yang telah dijalankan di Kota Makassar selama

ini terlihat nyata bahwa pertumbuhan tenaga kerja yang cukup pesat kurang dapat diimbangi oleh kemampuan penciptaan kesempatan kerja sehingga terjadi pengangguran terbuka yang terakumulasi setiap tahunnya.

Pengembangan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor terutama pada sektor industri yang terdapat pada berbagai daerah serta ditujukan pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan di sektor perindustrian pemerintah daerah Kota Makassar harus lebih memperhatikan tentang masalah ketenagakerjaan.

Berdasarkan data BPS, pada akhir tahun 2005 jumlah pencari kerja pada industri di Kota Makassar 26.319 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10.824 orang dan perempuan 15.495 orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pencari kerja pada industri di Kota Makassar menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa tingkat pendidikan SMA yang menempati peringkat pertama yaitu sekitar 66,20% disusul tingkat pendidikan sarjana sekitar 20,26%. Sedangkan berdasarkan daya serap tenaga kerja, sejak tahun 2004 sektor industri Kota Makassar hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 9,42%, kemudian pada tahun 2005 naik menjadi 10,84% dari seluruh pekerja dan mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 23,55% pada tahun 2004, kemudian naik menjadi 23,56% pada tahun 2005.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan pencari kerja tersebut disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar, dipihak lain menuntut peningkatan kualitas (baik pencari kerja maupun

tenaga kerja yang terserap) itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk bersaing di era globalisasi. Faktor sumber daya manusia merupakan salah satu masalah pada ketenagakerjaan yang harus diperhatikan yang meliputi :

1. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia yang terdapat di Kota Makassar pada umumnya masih rendah dan statis. Kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada umumnya mereka tidak dinamis dan tidak memiliki keterampilan dan kecakapan serta semangat yang tinggi, karena rendahnya tingkat pendidikan. Bagi mereka yang memiliki pendidikan cukup pun, kebanyakan hanya siap bekerja pada lapangan kerja yang kurang inovatif, bekerja sebagai pekerja dan bukan sebagai pencipta lapangan kerja. Sehingga pola pendidikan yang mempersiapkan lulusan yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan wirausahawan harus diperluas.

2. Penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaan tenaga kerja

Supply of labor yang melebihi *Demand of labor* merupakan masalah dalam mengembangkan sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya tingkat investasi merupakan penyebab rendahnya permintaan tenaga kerja. Meskipun tingkat investasi tinggi tetapi tingkat permintaan tenaga kerja lokal tetaplh rendah. Hal ini disebabkan yang dibutuhkan untuk investasi tertentu diperlukan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu pula. Misalnya pada sektor industri dengan tingkat teknologi yang tinggi maka diperlukan tenaga kerja dengan penguasaan tingkat teknologi yang tinggi

pula. Pada negara berkembang tenaga semacam itu masih sangat kurang sehingga tak jarang harus mendatangkan tenaga asing dengan tingkat upah yang relatif mencolok.

Tenaga kerja lokal kurang dapat bersaing di bursa kerja nasional maupun internasional. Akibatnya tenaga kerja lokal tidak dapat bersaing dan terserap di sektor tersebut. Pada akhirnya penawaran (*supply*) tenaga kerja melebihi permintaan (*demand*) tenaga kerja akan menimbulkan berbagai jenis pengangguran (*unemployment* dan *underemployment*) dan rendahnya tingkat upah.

3. Tingginya lulusan sekolah yang menganggur

Semakin tingginya lulusan sekolah yang menganggur pada negara berkembang lebih disebabkan oleh kurangnya proyeksi pendidikan dan proyeksi lapangan pekerjaan. Kebanyakan lembaga pendidikan hanya menghasilkan lulusan yang kurang *marketable*. Dari tahun ke tahun lulusan dari berbagai tingkatan sekolah yang menganggur terus membengkak. Tidak sedikit para sarjana yang menganggur. Sekali lagi, kebanyakan lembaga pendidikan hanya menghasilkan *worker* bukan *employer / entrepreneur*.

4. Surplus tenaga kerja tidak terdidik

Kelebihan tenaga kerja tidak terdidik merupakan persoalan yang cukup pelik di setiap kabupaten yang ingin mengisi kesempatan kerja. Tenaga kerja tidak terdidik yang masih ada pada umumnya adalah 'melek huruf' dan berpikir tradisional.



Selain masalah-masalah definisi dalam perhitungan tenaga kerja yang telah dikemukakan di atas, perlu diperhatikan intensitas dari implementasi kebijakan industrialisasi itu sendiri baik yang bersifat telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan (meliputi perubahan). Implementasi kebijakan industrialisasi semestinya mencerminkan bagaimana pihak pemerintah dalam melaksanakan kebijakan industrialisasi tersebut bertujuan dapat memberdayakan ketenagakerjaan. Namun, dalam implementasinya saat ini masih banyak mengalami keterhambatan yang berdasarkan pengamatan sementara penulis yaitu meliputi :

1. Dalam pelaksanaan kebijakan, aktor yang terlibat (pemerintah) kurang memperhatikan secara nyata kondisi tenaga kerja yang ada di lapangan tetapi lebih banyak berpatokan pada data yang ada.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa (pihak pemerintah yang melaksanakan kebijakan) yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi terlaksananya kebijakan industrialisasi tersebut.
3. Daya tanggap tenaga kerja yang kurang memahami kebijakan pemerintah di sebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah sebelum dan sesudah mengimplementasikan kebijakan industrialisasi.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena diatas penyusunan dan penetapan arah dan kebijakan industrialisasi memerlukan keterlibatan dan kesepakatan bersama berdasarkan seluruh potensi yang ada pada wilayah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Amanat konstitusi harus dijabarkan sebagai pesan agar pembangunan industri dalam rangka mendukung

pembangunan ekonomi Kota Makassar didasarkan pada upaya pendayagunaan seluruh potensi dan ragam sumber daya ekonomi yang dimiliki secara optimal dan arif, agar mampu menjadi wahana terhadap ketenagakerjaan dan pada umumnya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, pembangunan industri di Kota Makassar yang telah berjalan dengan baik selama ini harus diakui belum mampu menghasilkan atau mewujudkan pembangunan industri yang tangguh dan berakar dari keunggulan kualitas Sumber Daya Alam (SDM) dan potensi kekayaan sumber daya yang dimiliki.

Hal inilah yang menjadi objek kajian penelitian kami yakni ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan di Kota Makassar dalam studi tentang kebijakan. Dengan pendekatan kualitatif kami ingin melihat dan mengkaji apakah dalam implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan yang selama ini berjalan telah sesuai sebagaimana mestinya yaitu berdasarkan pada prosedur kebijakan yang telah dipedomani dan ditetapkan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini kami sengaja memilih Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagai pihak pemerintah yang mengimplementasikan secara teknis kebijakan industrialisasi serta tenaga kerja industri di Kota Makassar sebagai objek kebijakan dalam penelitian ini karena kebijakan industrialisasi yang dibawa pemerintah Kota Makassar harus secara jelas menjadi visi pemerintah dalam pembangunan industri.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Melihat luasnya pengaruh yang ditimbulkan dalam "Implementasi Kebijakan Industrialisasi Ketenagakerjaan" ini, maka penulis mencoba memberikan batasan masalah dalam makalah ini. Pembahasan mengenai implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan telah marak diperbincangkan dan telah banyak dimuat di surat-surat kabar sehingga kita perlu mengetahui tingkat kegiatan serta pemikiran manusia di segala bidang. Tidak mengherankan bila begitu banyak disiplin ilmu berusaha menganalisis prosedur kebijakan tersebut.

Meskipun dalam konsep pengertian Industri yang tangguh ditujukan untuk mencakup kemampuan produksi di semua sektor (primer, sekunder dan tersier), namun mengingat lingkup industrialisasi yang sangat luas maka implementasi kebijakan industrialisasi yang dirumuskan dalam penyusunan ini juga sengaja kami batasi hanya untuk menampilkan implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan pada sektor industri pengolahan/ manufaktur khususnya industri yang tergolong kecil dan menengah (IKM).

Industri pengolahan/manufaktur adalah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer. Yang dimaksudkan produk primer adalah produk-produk yang tergolong bahan mentah, yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan, dengan kemungkinan mencakup produk pengolahan awal sampai dengan bentuk dan spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai produk primer.

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang diangkat untuk dikaji lebih jauh yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan di Kota Makassar di Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan yang telah diterapkan pemerintah agar dapat tercipta solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan di Kota Makassar sehingga pemerintah mampu mengevaluasi dalam mengambil tindakan yang tepat.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Secara praktis, dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan dalam mengevaluasi masalah-masalah nasional terutama masalah dalam implementasi kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Di satu sisi juga diharapkan untuk memperkaya kajian sosiologi tentang konsep perubahan sosial, dan disisi lain secara praktis diharapkan

menjadi bahan masukan bagi berbagai instansi, khususnya mengenai implementasi kebijakan.

2. Secara akademis, dapat menjadi masukan dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Adminstrasi Negara ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Pengertian Kebijakan

Berbicara mengenai "kebijakan (*policy*)" hendaknya dibedakan dengan "kebijaksanaan (*wisdom*)", meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal/individu pejabat yang berwenang (Syaf'ie, 1999:105). Dengan demikian, yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah suatu kebijakan tersebut disepakati. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah "*policy*" ke dalam Bahasa Indonesia.

Untuk mempertajam pengertian tentang kebijakan, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ilmuwan sebagaimana yang dikutip dari Thoha (2002: 60-61). Salah satu diantaranya adalah menurut Lasswell dan Kaplan yang menyatakan bahwa :

"Kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika."

Selanjutnya, **Eulau dan Prewitt** merumuskan kebijakan sebagai :

"Suatu keputusan yang teguh dan disifati oleh adanya perilaku yang konsisten, serta pengulangan pada bagian keduanya, yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya.

Dalam hal ini, kebijakan dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain yang melaksanakannya dengan menekankan perilaku yang konsisten dan berulang.

Dengan mengacu pada pendapat para ilmuwan di atas, **Thoha (2002:59-60)** merumuskan bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek pokok, yaitu:

- a. Kebijakan merupakan *pratika* sosial, bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Berdasarkan kedua aspek pokok tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada satu pihak, kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak

kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik yang menimbulkan insentif.

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988 : Hal 66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan James E. Anderson (1978 : Hal 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa suatu kebijakan memuat 3 komponen/elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyedia berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dari ketiga komponen atau elemen diatas sudah jelas bahwa kebijakan adalah suatu langkah awal dan teknik yang dapat menimbulkan implementasi. Sebaliknya pula proses implementasi tidak akan berjalan tanpa adanya suatu program atau kebijaksanaan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang kebijakan (*policy*) mencakup pertanyaan : *what*,

why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan yang dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya (Charles O. Jones, 1991: 166).

Penekanan selanjutnya adalah pada kebijaksanaan, sebagaimana dalam rumusannya juga mempunyai sifat antar disiplin. Dalam hubungan tersebut maka Mustopadijaya (2003 : Hal 43-44) mengemukakan bahwa:

"Pendekatan antar disiplin dalam pengembangan sistem administrasi lebih disadari, antara lain disebabkan peranannya sebagai penyelenggara kebijaksanaan oleh sistem administrasi meliputi keseluruhan siklus kebijaksanaan (*policy*) yang dapat dikelompokkan dalam 3 kegiatan berupa perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan dan/atau pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan serta pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan analisis kebijaksanaan (*policy analysis*)".

Setelah dikemukakan pengertian dari kebijaksanaan itu sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah adanya serangkaian rumusan dengan tujuan tertentu dan tindakan-tindakan apa yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau kelompok kerjasama, baik yang bersifat penyedia input, maupun teknik menstrategi pelaksanaan.

Anderson selanjutnya menjelaskan tentang mengapa setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melaksanakan kebijaksanaan negara, adalah sebagai berikut :

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah.
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijaksanaan.
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijaksanaan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, serta melalui prosedur yang benar.

Sebaliknya, **Anderson** juga menguraikan penyebab mengapa orang tidak mematuhi dan melaksanakan kebijaksanaan negara adalah sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.
- b. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.
- c. Keanggotaan seseorang dalam suatu suatu perkumpulan atau kelompok.
- d. Keinginan untuk mencari untung dengan cepat.
- e. Adanya ketidakpastian hukum.

Dalam studi kebijaksanaan dikenal istilah kebijakan negara "*public policy*". Oleh karena itu dalam penyusunan ini ingin melihat salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan erat dengan kepentingan umum. Maka studi ini lebih menekankan terlebih dahulu untuk memahami apa yang dimaksud kebijakan publik.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Setelah memahami dengan seksama pengertian dari kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, adalah penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan private/swasta (Afan Gaffar, dalam Nugroho, 1991:7).

Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles O. Jones (1991: Hal 3) di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.

Santoso (1998:4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye (1992:3) bahwa :

"Public policy is whatever government chose to do or not to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas R. Day di atas, telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mencakup "apa" yang dilakukan, "mengapa" mereka melakukannya, dan "bagaimana" akibatnya (Afan Gaffar, dalam Nugroho 1991:7).

Di pihak lain, George C. Edward III (1980:2) menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah *"what government say and do, or not to do"*. Bahkan David Easton (1953:129) yang dikutip dalam Budi Winarno, 2007:8) mengemukakan bahwa :

"Policy is the authoritative allocation of value for the whole society" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat).

Dari penjelasan yang dikemukakan kedua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh

badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson, 1978:3).

Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

- a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
- b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
- c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu
- d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (*otoratif*).

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Samodro Wibowo (1994:190) bahwa :

"Kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara."

Kesimpulan dari pandangan ini adalah : *pertama*, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan *kedua*, kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka M. Irfan Islamy (1997 : Hal 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut W.J.S. Poerwadarminta berarti "*pelaksanaan*". Sedangkan dalam kamus Webster (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997 : 64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "*to implementasi*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means*

for carrying out; to give practical effect to" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991 : 166), dimana implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, Jones menuntut adanya syarat antara lain : adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Selanjutnya, Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Solichin Abdul Wahab (1997:9) dalam *"Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi"* mengatakan bahwa derajat keberhasilan implementasi dapat disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Sebagai akibat kondisi kebijaksanaan kurang terumuskan secara baik
- b. Akibat dari sistim administrasi pelaksanaannya yang kurang baik
- c. Akibat kondisi lingkungan yang kurang baik.

Dari beberapa teori tentang implementasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi menunjukkan adanya suatu proses sampai kebijakan bisa dilaksanakan.

Dalam proses implementasi sukurang-kurangnya terdapat tiga unsur dan mutlak yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target groups, yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan (Implementasi).

Baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut (Syukur Abdullah, 1987).

Menurut Van Meter dan Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

"Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions."

Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. ([http://images.soemarno.multiply.com/.](http://images.soemarno.multiply.com/))

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup : manusia, dana, dan kemampuan organisasi, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Selanjutnya, **Mazmanian dan Sabatier** (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997 : 65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut :

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dari berbagai aspek implementasi kebijakan di atas, menurut William Dunn (1983:31) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Sedangkan Marse (dalam Hoogerwerf, 1983 : 17) menyatakan implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Selanjutnya, Jones (1994 : Hal 296) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

- "Suatu kebijakan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga kegiatan berikut ini adalah pilar-pilarnya yaitu :
- a. Organisasi : pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
 - b. Interpretasi : menafsirkan agar program (sering kali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
 - c. Aplikasi : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perfengkapan program".

Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan diibaratkan sebagai suatu program yang dioperasikan oleh berbagai komponen yang dalam hal ini pilar-pilarnya terdiri dari organisasi, interpretasi serta aplikasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut George C. Edward III dalam "*Implementing Public Policy*" (1980 : 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

1. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas
- Perintah
- Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.



2. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

3. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain (The Liang Gie, 1982). Faktor komunikasi juga dianggap sebagai faktor yang amat penting dalam implementasi kebijakan, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "*Bagaimana hubungan yang dilakukan*".

4. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk membuat kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

D. KONSEP KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI DAN KETENAGAKERJAAN

1. Pengertian Industrialisasi

Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi tidaklah terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu ketenagakerjaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Secara umum kaitan antara pembangunan dengan industrialisasi dijelaskan oleh Garna dalam Kuncoro, (1997: Hal 17-18), yakni:

- a. Bahan untuk proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Pembangunan industri merupakan upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam;
- c. Pembangunan industri akan memacu dan menyangkut pembangunan sektor lainnya, yang dapat memperluas lapangan kerja yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dan;
- d. Dalam pembangunan industri akan terjadi ketimpangan yang merugikan, yang bersifat ekonomi ataupun non ekonomi.

Sebelum memahami lebih dalam tentang pengertian dari industrialisasi maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dari industri. Berbicara mengenai pengertian industri banyak ahli yang memberi pandangan, baik secara umum maupun secara khusus dalam berbagai



tulisan dan literature. Untuk lebih jelasnya kita dapat memperhatikan beberapa pendapat tentang industri adalah sebagai berikut :

Menurut Sadly (1971 : Hal 49) menyatakan bahwa :

"Industri adalah merupakan kumpulan dari perusahaan atau firma yang menghasilkan barang-barang yang sejenis atau perusahaan-perusahaan yang memakai bahan mentah yang serupa atau yang mempunyai proses yang sama."

Pendapat yang agak sama dikemukakan oleh Meyers yang dikutip dalam Kuncoro (1967 : Hal 146) bahwa :

"An industry is a group of firm producing a homogenesis commodity or a group of commodities that are close substitute for each other".

Dari defenisi di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan industri adalah suatu kumpulan pabrik yang memproduksi barang-barang yang sejenis atau sekelompok barang yang dapat disubstitusikan antara yang satu dengan yang lainnya.

Untuk tidak menimbulkan kekacauan tentang pemahaman industri, maka dalam UU tentang perindustrian yaitu UU Nomor 5 tahun 1984 menyebutkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi, sehingga barang tersebut menjadi lebih tinggi nilainya.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa industri terdiri dari beberapa perusahaan dengan tujuan memproduksi barang serupa, yang didalam prosesnya merubah bahan/barang dari bentuknya menjadi bentuk lain sehingga terlihat adanya

suatu perubahan, yang mana perubahan tersebut merupakan suatu peningkatan dalam nilai suatu barang.

Pengertian industri yang dimaksudkan ini, titik beratnya adalah pada pendekatan dari sudut proses produksi, yaitu dari bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga menjadi barang yang sifatnya lebih dekat dengan konsumen akhir. Dengan demikian Industrialisasi diartikan sebagai suatu proses dalam cara-cara produksi sederhana diubah menjadi cara-cara produksi baru dengan menggunakan mesin. Dalam hal ini, misalnya pada industrialisasi pertanian jika perekonomiannya selama ini bersifat agraris sekarang dilengkapi dengan industri. Dengan kata lain industrialisasi merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh kehidupan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan dari konsep "industrialisasi" tersebut, dinyatakan oleh Reinhard Bendix bahwa :

"Industrialisasi adalah perubahan ekonomi yang disebabkan teknologi berdasarkan ditemukannya sumber-sumber energi sebagai akibat perkembangan riset ilmiah "<http://wilmana.wordpress.com>

Noah Webster yang dikutip dari penelitian Victor Riwo Kaho (2008) juga menjelaskan lebih lanjut makna kata ini sebagai berikut :

"INDUSTRY, n. [L. industria.] Habitual diligence in any employment, either bodily or mental; steady attention to business; assiduity; opposed to sloth and idleness. We are directed to take lessons of industry from the bee. Industry pays debts, while idleness or despair will increase them." <http://wilmana.wordpress.com>

Dari Thesaurus English Ms Word, dapat ditemukan beberapa padanan dari kata ini yaitu : *manufacturing, business, commerce, trade, engineering, production*. Bahkan bisa juga dipadankan dengan kata-kata yang lebih sederhana seperti, *hard work, diligence, productiveness, activity, etc.*

Sedangkan menurut pengertian kamus sendiri, industrialisasi diartikan secara sangat sederhana, "*mengadakan industri*". Padahal jika kita meninjau lebih dalam lagi, industrialisasi adalah suatu proses menciptakan interaksi para pihak yang memiliki kepentingan ekonomis yang sama terhadap suatu siklus rantai nilai. Proses ini dapat terjadi secara alamiah maupun disengaja. Secara alamiah, pemicu proses industrialisasi adalah pasar. Jadi, pasar yang membutuhkan barang/jasa otomotif memancing munculnya para produsen otomotif untuk mensuplai kebutuhan pasar. Pada gilirannya, kebutuhan logistik produsen akan menghadirkan para supplier. Lalu, setelah barang/jasa selesai dibuat, maka proses delivery ke pasar akan memertukan para distributor dari hulu ke hilir. Ketika tingkat persaingan menjurus tak terkendali, bahkan kepentingan lingkungan sosial dan alam harus diakomodir, maka pemerintah turun tangan menjadi wasit melalui berbagai regulasi yang menjamin keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness <http://wilmama.wordpress.com>.

Sementara pada proses industrialisasi secara rekayasa, Pemerintah memainkan peranan utama sebagai Inisiator, Motivator, Fasilitator, Koordinator, Regulator, bahkan Think Tank agar para stakeholders industri dapat berinteraksi sesuai kepentingannya secara efisien dan efektif. Di beberapa kota besar, kita lihat pemerintah membangun kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), atau kawasan industri. Semua itu adalah bagian dari upaya pemerintah menciptakan iklim yang kondusif bagi para stakeholders industri untuk berinteraksi secara efisien dan efektif guna mencapai tujuannya masing-masing. Dari proses ekonomis dalam industri, pemerintah dapat mengambil manfaat berupa pajak-pajak dan penerimaan lainnya yang pada gilirannya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah menjadi stakeholder utama dalam penciptaan *industry tree* (sistem jaringan terintegrasi dari para stakeholders dalam industri).

Dari seluruh penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa industrialisasi adalah suatu komunitas yang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan saling berinteraksi, saling terkait, saling mengisi, dan saling memberi manfaat. Semuanya bekerja sama bagi kesejahteraan bersama <http://wilmana.wordpress.com>. Jadi kesimpulannya bahwa ciri industrialisasi sendiri dapat dilihat antara lain melalui cara pelaksanaan (strategi yang ditetapkan), jenis industri yang diunggulkan, pola pengembangan industri, dan insentif yang diberikan.

Secara garis besar industri dikelompokkan ke dalam 3 sektor yaitu :

- a. Sektor A (Pertanian)
- b. Sektor M (termasuk pertambangan, manufaktur, bangunan listrik dan air, pengangkutan dan perhubungan)
- c. Sektor S (perdagangan dan jasa).

Sedangkan kriteria lain untuk menentukan besaran industri dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang digunakan atau kapasitas mesin yang digunakan, yaitu :

- a. Industri besar adalah perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 orang tanpa menggunakan mesin, atau menggunakan tenaga kerja 50 orang atau lebih dengan menggunakan tenaga mesin.
- b. Industri sedang adalah industri yang menggunakan tenaga kerja 10 orang sampai dengan 99 orang tanpa menggunakan tenaga mesin, atau menggunakan tenaga kerja 5 sampai dengan 49 orang dengan menggunakan tenaga mesin.
- c. Industri kecil adalah industri yang menggunakan tenaga kerja sampai 10 orang tanpa menggunakan mesin, atau memakai tenaga kerja 5 orang dengan menggunakan mesin (Adisasmita, 1989 : Hal 6).

Kelompok Industri tersebut dipergunakan dalam mengklasifikasi kegiatan serta volume output yang dihasilkan. Demikian juga terhadap tenaga kerja serta modal yang dipergunakan industri-industri tersebut

berkembang dan dipusatkan pada berbagai daerah sesuai dengan sifat industri itu sendiri.

2. Pengertian Kebijakan Industrialisasi

Mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka perlu ditegaskan bahwa tugas administrator publik bukan membuat kebijaksanaan negara yang dalam hal ini menyangkut kebijaksanaan industrialisasi atas nama kepentingan publik tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan, keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat terutama pada tenaga kerja.

Defenisi dari kebijakan industrialisasi itu sendiri disimpulkan menurut Rodrick (dikutip dari Kuncoro, 2007:5) adalah program-program yang diambil oleh pejabat pemerintahan untuk mendukung dan mengarahkan pengembangan perindustrian secara efektif dengan tujuan investasi. Kebijakan industrialisasi yang baru yang sedang berkembang saat ini, menyarankan bahwa kebijakan perindustrian mencerminkan prinsip-prinsip desain sebagai berikut :

- a. Insentif harus dibatasi hanya pada kegiatan "baru".
- b. Ketentuan tentang hal yang beresiko tinggi (*sunset provisions*) harus bersifat otomatis.
- c. Tolak ukur yang jelas untuk kesuksesan dan kegagalan harus ditetapkan.

- d. Badan pelaksana harus menunjukkan kompetensi dan secara relatif bebas dari politik.
- e. Kepemimpinan harus berasal dari pejabat tinggi.
- f. Keikutsertaan sektor swasta harus sistematis.

Lebih lanjut, menurut Mountjoy yang dikutip dalam Kuncoro, (2007:6) bahwa paling sedikit ada 3 sasaran pokok yang ingin dicapai melalui kebijakan industrialisasi yaitu :

- a. Pengadaan pekerjaan bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat.
- b. Meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan perkapita serta
- c. Memperbaiki situasi-situasi neraca pembayaran melalui peningkatan ekspor.

Berdasarkan defenisi di atas dapat ditegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu pada masyarakatnya karena pemerintah tersebut sebagai *authorities in a political system* yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah yang telah menjadi tanggungjawabnya.

Suatu kebijaksanaan industrialisasi tidak akan ada artinya apabila kebijaksanaan itu sendiri tidak dilaksanakan sehingga hanya akan menjadi sesuatu yang hampa nilainya. Kebijaksanaan yang telah dibuat hanya akan mempunyai arti bila telah diimplementasikan dalam kenyataan.

3. Pengertian Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan bagian dari pada penduduk yang terus-menerus meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk di suatu daerah. Di Indonesia istilah tenaga kerja mulai sering dipergunakan dan untuk mengetahui pengertian tenaga kerja tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai tenaga kerja, yaitu :

Menurut JAMSOSTEK dalam ketentuan umum Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Pasal 1 disebutkan bahwa :

"Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat."(Syarif, M : 2007)

Pengertian tenaga kerja menurut JAMSOSTEK tersebut mengandung maksud bahwa tenaga kerja tersebut mempunyai hubungan yang positif dengan kegiatan produksi karena sumber daya atau kekuatan yang senantiasa dapat mendorong kapasitas produksi. Dalam hubungan ini adalah orang-orang yang aktif melakukan pekerjaan dan memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa yang tidak digunakan oleh mereka sendiri melainkan oleh masyarakat luas. Kegunaan dan kerjanya adalah untuk kelangsungan hidup masyarakat, yang memberikan gambaran yang konkrit. Dari pengertian tersebut maka dalam hal ini tenaga kerja dianggap sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan masyarakat.

Terkait penjelasan di atas, maka beberapa ahli juga memberikan penjelasan tenaga kerja yang menurut Tan Goang Tiang bahwa :

"Tenaga kerja adalah jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut." (<http://www.google.wordpress.com>)

Selanjutnya, menurut Dumairy bahwa :

"Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batas usia kerja yang dianut di Indonesia ialah minimum 10 tahun, tanpa batas usia maksimum." (<http://www.google.wordpress.com>)

Dari pengertian yang disebutkan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam suatu wilayah yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk dapat menghasilkan barang dan jasa serta dapat dikategorikan berdasarkan batasan dari usia kerja. Batasan usia kerja berdasarkan BPS yaitu penduduk dengan usia kerja/berumur 10 tahun keatas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Batasan-batasan tenaga kerja lebih lanjut dapat ditinjau dari segi demografi, ekonomi dan tingkat produktivitas. Disebutkan bahwa tenaga kerja ditinjau dari segi demografi adalah setiap orang/penduduk yang termasuk umur 10 tahun ke atas. Berarti mulai dari kelompok umur ini telah dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Tenaga kerja ditinjau dari segi ekonomi adalah seorang/sejumlah orang yang secara langsung turut serta memberikan pengorbanan berupa kemampuan tenaga kerja maupun pikiran dalam proses produksi yang berhak menerima upah sebagai balas

jasa dari benda atau jasa-jasa yang dihasilkan. Senantiasa tenaga kerja jika ditinjau dari segi tingkat produktivitas adalah seorang yang komposisi umurnya berkisar antara 16 tahun sampai 55 tahun. Berdasarkan komposisi inilah maka seorang dapat dianggap sebagai tenaga kerja produktif (Syarif, M : 2007).

E. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRIALISASI

Arahan kebijakan pembangunan industri daerah/wilayah di Kota Makassar adalah tetap mengacu kepada agenda dan prioritas kebijakan industrialisasi nasional, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 dan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2010-2025 (www.depperin.go.id). Dalam penjabaran kebijakan tersebut, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi sebuah negara industri tangguh di dunia dengan visi yaitu pada tahun 2024 Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru.

1. Sasaran Kebijakan

<u>Jangka Menengah (2004-2009)</u>	<u>Output yang diharapkan :</u>
1. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar.	1. Teratasinya masalah pengangguran di sektor industri.
2. Selesainya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri.	2. Pulihnya kehidupan industri yang semula terpuruk akibat krisis.
3. Teroptimalkannya pasar dalam negeri dalam rangka pembangunan industri komponen lokal dan industri pengolahan	3. Meningkatnya kandungan lokal, khususnya penggunaan bahan

<p>sumber daya alam lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor. 5. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan. 6. Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar tiga kali lebih cepat daripada industri kecil. 	<p>baku dan komponen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya ekspor secara signifikan. 5. Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan. 6. Semakin kuatnya struktur industri
<p><u>Jangka Panjang (2010-2025)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuanya basis industri manufaktur sehingga menjadi World Class Industry. 2. Kuatnya industri penggerak pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatnya sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan dengan sumbangan industri besar. 4. Kuatnya jaringan kerja sama (networking) antara IKM dan industri besar. 	<p><u>Output yang diharapkan :</u></p> <p>Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru dengan konsep industri berkelanjutan.</p>

2. Kebijakan Industrialisasi Ketenagakerjaan

Sebagai jabaran yang lebih operasional dari pesan-pesan yang termuat dalam arah kebijakan pembangunan industrialisasi yang berintikan azas-azas pembangunan industri yang harus di acu, ditetapkanlah arahan operasional. Arahan operasional ini akan diimplementasikan diberbagai aspek-aspek industri setiap cabang industri prioritas, dimana misi pengembangannya sesuai dengan karakteristik cabang industrinya. Yang dalam hal ini, setiap aspek ditujukan pada

setiap cabang industri di setiap daerah. Aspek-aspek yang dimaksud tersebut meliputi :

- a. Pengembangan Lingkungan Bisnis
- b. Pengembangan Infrastruktur
- c. Pengembangan Investasi
- d. Pengembangan Pasar
- e. Pengembangan Kemampuan Tenaga Kerja Industrialisasi
- f. Pengembangan Teknologi Industri, dan
- g. Pengembangan Bahan Baku/Penolong.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan industrialisasi khususnya dalam penelitian ini yaitu terhadap ketenagakerjaan seperti yang telah dirumuskan di atas, yang perlu mendapatkan komitmen dan dukungan dari Instansi/Departemen lain, dapat dijabarkan melalui :

- a. Melakukan reorientasi pengembangan SDM dengan mengacu pada kebutuhan dunia industri.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sampai dengan perguruan tinggi khususnya dibidang teknik yang menghasilkan tenaga ahli madya.
- c. Memperluas infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keahlian tenaga kerja di bidang teknik dan manajerial.
- d. Meningkatkan keterkaitan lembaga litbang, industri serta perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi yang tepat dalam pelatihan tenaga kerja untuk industri.

- e. Meningkatkan kompetensi SDM industri melalui program pendidikan, pelatihan dan pemagangan dengan mendayagunakan lembaga sertifikasi tenaga profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- f. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus di bidang teknologi, proses dan produk, teknik desain dan manajemen.

Dalam pengembangan SDM ini, instansi atau departemen yang perlu mendukung antara lain : Departemen Diknas, Departemen Nakertnas, KRT, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Koperasi dan UKM.

. HIPOTESIS KONSEPTUAL

Bertolak dari latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, dimana Implementasi Kebijakan Industrialisasi merupakan salah satu bentuk dari proses pelaksanaan kebijakan yang berasal dari badan pemerintah yang bergerak dibidang jasa yang dalam hal ini bertujuan memberdayakan tenaga kerja. Untuk mengetahui sasaran tercapai atau tidak maka diperlukan implementasi yang baik yang berorientasi pada tujuan yang ditetapkan, dengan menggunakan strategi melalui kebijakan. Hal ini tentunya diperlukan agar kita dapat menilai proses dari implementasi kebijakan, apakah berjalan berdasarkan prosedur kebijakan yang telah ditentukan atau tidak.

Implementasi kebijakan yang baik dalam industrialisasi juga ditujukan untuk menekan terjadinya berbagai kesalahan-kesalahan dalam rangka perbaikan sumber daya manusia khususnya bagi tenaga kerja industri. Untuk itu pihak-pihak yang berwenang harus sering mengadakan evaluasi guna

penyempurnaan proses kebijakan yang ditujukan pada ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kerja.

Pendekatan dalam implementasi kebijakan Industrialisasi menggunakan pendekatan yang lazim dipakai yakni pendekatan struktur, proses dan hasil.

1. Pendekatan struktur adalah berfokus pada program kebijakan yang dipersiapkan dalam organisasi dan manajemen termasuk komitmen dari pemerintah.
2. Pendekatan proses adalah semua kegiatan dan interaksi professional (bertumpu pada kemampuan, sikap dan keterampilan) serta metode dengan cara bagaimana kebijakan industrialisasi di implementasikan.
3. Hasil (*output*) adalah hasil implementasi kebijakan.

KERANGKA KONSEP

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan digambarkan kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan wawancara mendalam, yang kemudian hasil wawancara diolah dan akan diperoleh data. Dalam menganalisa data dilakukan berdasarkan teori George C. Edward III yaitu teori implementasi atau dengan menggunakan metode deduktif yang mengangkat permasalahan dari hal umum ke khusus.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kota Makassar khususnya pada :

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah merupakan pusat pemerintahan ditingkat Kotamadya yang mengelola secara teknis kebijakan di Industri sehingga hal ini memungkinkan semua fenomena yang terjadi di Instansi ini akan merambah kepada instansi dan departemen lain yang ada di Kota Makassar.
2. Masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga kerja yang tersebar pada industri pengolahan/manufaktur di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa sumber daya yang menjadi kunci utama dalam pengelolaan industri tersebut adalah tenaga kerja sehingga kebijakan yang ditujukan pada industri selalu berpengaruh lebih besar kepada tenaga kerja.

C. JENIS PENELITIAN

Menurut Newman (1997:89), jenis penelitian dapat digolongkan berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti.

Berdasarkan manfaat, penelitian ini tergolong penelitian murni, yaitu penelitian yang diadakan berdasarkan norma absolute penelitian dan tujuan utamanya untuk menyumbangkan pengetahuan murni. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk melihat kesesuaian antara teori dengan realita dilapangan.

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* yaitu hanya mengambil satu bagian (populasi) pada saat waktu tertentu. Menurut teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong penelitian dengan data kualitatif (wawancara). Wawancara diajukan pada objek penelitian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Studi Lapangan

Studi lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengamatan terhadap objek secara langsung.
- b. Wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada mereka. Pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan adalah mengenai masalah implementasi kebijakan dalam upaya pemberdayaan ketenagakerjaan.

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan yang sudah dipublikasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, buku, artikel, jurnal dan internet. Data sekunder penelitian ini juga diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti dinas tenaga kerja yang bersangkutan.

E. INFORMAN

Informan adalah orang yang dianggap berkompetisi untuk ikut terlibat serta berpengaruh pada proses implementasi kebijakan. Adapun informan yang akan menyusun wawancarai dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Bagian Departemen Perindustrian
2. Staf Bagian Departemen Perindustrian
3. Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan/Manufaktur

F. DEFENISI OPERASIONAL

1. Proses implementasi suatu kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua

pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Terdapat indikator yang berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan karena tanpa indikator itu suatu kebijakan tidak akan bisa berjalan, dengan kata lain kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi sebuah dokumen saja. Indikator tersebut antara lain :

a. Sumber daya

Kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses pelaksanaan kebijakan, yakni sumber daya manusia yang ada serta sarana atau fasilitas.

b. Struktur Birokrasi

Adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dalam proses implementasi kebijakan.

c. Komunikasi

Cara, bentuk dan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

d. Disposisi

Komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi kebijakan.

2. Kebijakan Industrialisasi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dijabarkan melalui langkah-langkah pengimplementasian pada berbagai aspek, untuk mendukung dan mengarahkan pengembangan perindustrian secara efektif ke arah yang lebih baik. Kebijakan Industrialisasi

yang dijabarkan dalam penyusunan ini ditujukan dalam rangka pengembangan tenaga kerja industrialisasi yang indikatornya meliputi :

- a. Reorientasi Pengembangan SDM
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan hingga perguruan tinggi
- c. Memperluas infrastruktur Diklat
- d. Meningkatkan keterkaitan lembaga
- e. Meningkatkan kompetensi
- f. Pengembangan program Diklat.

H. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif fenomenologis yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa sosial melalui wawancara mendalam. Teknik analisa ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan, juga mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan berbagai macam fenomena yang muncul dapat dideskripsikan secara jelas sehingga kualitas penelitian dapat mendekati realita sedangkan peneliti bertugas untuk menggali dan mendeskripsikan apa yang ada dalam pikiran manusia.

Untuk dapat menganalisis berbagai fenomena di lapangan (Miles & Huberman, 1992) maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan metrik, grafik, jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan (*conclusion*) yaitu mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI

A. PROFIL WILAYAH KOTA MAKASSAR

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{\circ}18'27,97''$ - $119^{\circ}32'31,03''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}00'30,18''$ - $5^{\circ}14'6,49''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km² dengan batas-batas berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Batas Selatan : Kabupaten Gowa
- Batas Timur : Kabupaten Maros
- Batas Barat : Selat Makasar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km² dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan

sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pusat kegiatan industri.

TABEL I . LUAS WILAYAH KOTA MAKASSAR

No.	KECAMATAN	LUAS (Km ²)
(1)	(2)	(3)
1.	Tamalanrea	31,84
2.	Biringkanaya	48,22
3.	Manggala	24,14
4.	Panakkukang	17,05
5.	Tallo	5,83
6.	Ujung Tanah	5,94
7.	Bontoala	2,10
8.	Wajo	1,99
9.	Ujung Pandang	2,63
10.	Makassar	2,52
11.	Rappocini	9,23
12.	Tamalate	20,21
13.	Mamajang	2,25
14.	Mariso	1,82
	Total	175,77

Sumber : Litbang Kompas diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2001

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 142 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.112.688 jiwa kemudian meningkat menjadi 1.179.023 jiwa pada tahun 2004. Ini menunjukkan, bahwa terjadi pertambahan penduduk sebesar 79.004 jiwa

dalam waktu empat tahun atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,64% per tahun. Dan hingga tahun 2005 penduduk kota Makassar telah tercatat sebanyak 1.193.434 jiwa.

Dengan jumlah penduduk tersebut, wilayah kecamatan yang terbesar penduduknya adalah Tamalate yakni 143.987 jiwa atau 12,21%, menyusul Kecamatan Rappocini yakni 136.128 jiwa atau 11,55% dan Kecamatan Panakkukang yakni 129.240 jiwa atau 10,96% dari total penduduk Kota Makassar.

Dibandingkan dengan luas wilayah daratan Kota Makassar, maka pada tahun 2004 tingkat kepadatan penduduk Kota adalah 6.708 jiwa/km², meningkat sebesar 1,64% dari tahun 2003, yakni 6.600 jiwa/km², sementara tingkat kepadatan untuk wilayah Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Makassar yakni 31.408 jiwa/km² dan menyusul Kecamatan Mariso yakni 28.724 jiwa/km². Sedang wilayah Kecamatan yang tingkat kepadatannya masih rendah dibanding Kecamatan lainnya adalah Kecamatan Biringkanaya yakni 2.460 jiwa/km², kemudian Kecamatan Tamalanrea yakni 2.646 jiwa/km² dan menyusul Kecamatan Manggala yakni 3.828 jiwa/km².

Dari sudut pandang komposisi umur, maka penduduk Kota Makassar tergolong dalam ciri "*expansive*", yakni sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Dari 1.179.023 jiwa penduduk Kota Makassar pada tahun 2004 sebanyak 582.382 laki-laki dan 596.641 perempuan, dimana untuk usia 0 – 39 tahun berjumlah 934.357



jiwa atau 79,25% sedang selebihnya penduduk usia 40 tahun ke atas berjumlah 244.666 jiwa atau 20,75%. Pada tahun 2002 pencari kerja tercatat sebanyak 23.903 orang yang terdiri dari 10.823 orang laki-laki dan 13.080 perempuan. Angka ini meningkat menjadi 65.504 orang pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 18,50% dari tahun sebelumnya.

Dari jumlah pencari kerja tersebut umumnya adalah mereka yang berpendidikan sarjana yakni 14.515 orang atau 51,24%, kemudian yang berpendidikan SLTA yakni 9.310 orang atau 32,87%, berikut adalah yang berpendidikan Sarjana Muda/D3 yakni 3.585 orang atau 12,66%, menyusul yang berpendidikan Diploma 1 dan Diploma 2 sebanyak 616 orang atau 2,17%, kemudian yang berpendidikan SLTP sebanyak 247 orang atau 0,87%, dan terakhir adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar yakni 52 orang atau 0,18%.

Dari gambaran lokasi di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat produktivitas berbagai kegiatan masyarakat utamanya dalam produktivitas industrialisasi. Dengan luas wilayah 175,77 Km² maka memungkinkan pembangunan industrialisasi dapat berlangsung secara terus-menerus.

2. Penduduk

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

**TABEL II. JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
DIRINCI MENURUT KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR**
*Number of population and Annual Growth Rate Population by Subdistricts in Makassar
2000, 2004-2005*

Kode Wli. Area Code	Kecamatan Subdistricts	Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2000	2004	2005	2000-2004	2004-2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Mariso	51.003	52.278	52.803	0,62	1,00
020	Mamajang	58.850	56.493	58.875	-1,02	4,22
030	Tamalate	128.329	143.987	144.458	2,92	0,33
031	Rappocini	125.498	136.128	136.725	2,05	0,44
040	Makassar	80.127	79.149	80.383	-0,31	1,56
050	Ujung Pandang	27.765	27.165	27.921	-0,54	2,78
060	Wajo	34.114	32.091	34.137	-1,52	6,38
070	Bontoala	56.875	54.063	56.991	-1,26	5,42
080	Ujung Tanah	44.055	45.491	45.801	0,18	0,68
090	Tallo	115.527	127.648	128.141	2,53	0,39
100	Panakkukang	123.820	129.240	129.967	1,08	0,56
101	Manggala	77.122	92.411	92.524	4,63	0,12
110	Biringkanaya	95.320	118.633	119.818	5,62	1,00
111	Tamalanrea	81.614	84.247	84.890	0,80	0,76
7371	Total	1.100.019	1.179.023	1.193.434	1,75	1,22

Sumber : BPS Kota Makassar

Ket : 2000 (Hasil Sensus Penduduk 2000, keadaan Juni 2000)
2004 (Hasil Estimasi BPS Kota Makassar, keadaan Desember 2004)
2005 (Hasil Susenas BPS Kota Makassar, keadaan Juni 2005)
*) Penduduk masih bergabung dengan Kec. Induk

b. Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Secara keseluruhan kepadatan Kota Makassar sebesar 6.330 jiwa/km², namun konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di lima kecamatan yaitu Tallo, Bontoala, Makassar, Mamajang dan Mariso yang kepadatan penduduknya berada di atas 20.000 jiwa/km².

**TABEL III. PERSENTASE PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK
MENURUT KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR**
*Percentage of Population and Population density by Subdistricts in Makassar
2000, 2004-2005*

Kode Wil. Area Code	Kecamatan Subdistricts	Persentase Penduduk Percentage of Population			Kepadatan Penduduk Population density (per Km ²)		
		2000	2004	2005	2000	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
010	Mariso	4,63	4,43	4,42	28,292	28.724	29.013
020	Mamajang	5,36	4,79	4,93	26,582	25.108	26.167
030	Tamalate	11,75	12,21	12,10	6.471	7.125	7.148
031	Rappocini	11,56	11,55	11,46	13.937	14.748	1.481
040	Makassar	7,24	6,71	6,74	31.981	31.408	31.898
050	Ujung Pandang	2,45	2,30	2,34	10.363	10.329	10.616
060	Wajo	3,13	2,72	2,86	17.504	16.126	17.154
070	Bontoala	5,16	4,59	4,78	27.336	25.744	27.139
080	Ujung Tanah	3,99	3,86	3,84	7.470	7.658	7.711
090	Tallo	10,48	10,83	10,74	20.006	21.895	21.980
100	Panakkukang	11,22	10,96	10,89	7.323	7.580	7.623
101	Manggala	6,96	7,84	7,75	3.208	3.828	3.833
110	Biringkanaya	8,63	10,06	10,04	1.992	2.460	2.485
111	Tamalanrea	7,43	7,15	7,11	2.596	2.646	2.666
7371	Total	100,00	100,00	100,00	6.330	6.708	6.790

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar
Source : Central Board of Statistic of Makassar

c. Tenaga Kerja

Pada tahun 2001 pencari kerja tercatat sebanyak 23.294 orang yang terdiri dari laki-laki 10.856 orang dan perempuan 12.438 orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pencari kerja menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa tingkat pendidikan sarjana yang menempati peringkat pertama yaitu sekitar 52,56 %.

TABEL IV. JUMLAH PENCARI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN DI KOTA MAKASSAR

No.	Tingkat Pendidikan	Terdaftar		Ditempatkan		Belum Ditempatkan		Dihapuskan	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	SD	39	15	2	-	37	15	-	-
2.	SLTP	179	162	31	3	125	122	23	37
3.	SLTA	7.072	5.750	1.547	1.056	4.963	4.347	562	347
4.	D1,D2	253	474	21	18	220	396	12	-
5.	Sarjana Muda/D3	1.410	2.471	191	222	1.1545	2.432	-	-
6.	Sarjana	6.874	8.862	773	377	6.225	8.290	-	-
	2003	15.827	17.734	2.565	1.676	12.724	15.602	597	397
	2002	13.676	15.639	1.432	1.147	10.823	13.080	1.421	1.412
	2001	10.856	12.438	1.795	656	6.899	8.964	2.162	2.818
	2000	10.663	11.572	4.386	2.902	6.277	8.670		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 2003
 Source : *Employment office of Makassar*

Dari gambaran lokasi di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan yang memiliki kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang memungkinkan pertumbuhan tenaga kerja pada industri bertambah tiap tahunnya. Penduduk Kota Makassar yang cukup tinggi dengan tingkat pendidikan yang cukup minim memungkinkan terjadinya peningkatan pencari kerja yang cukup besar, yang pada nantinya juga menjadi bagian yang harus dievaluasi oleh pemerintah.

Peningkatan jumlah pencari kerja banyak terjadi pada sektor-sektor industri oleh karena tingkat penyerapan industri cukup besar. Oleh karena itu, pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan perlu memberdayakan tenaga kerja yang telah diserap oleh industri agar nantinya dapat menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan.

B. PERINDUSTRIAN DI KOTA MAKASSAR

Sektor industri dapat dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Data mengenai industri besar dan sedang tersedia setiap tahun yang dikumpulkan dengan cara sensus lengkap. Sedangkan data industri kecil dan rumahtangga tidak tersedia setiap tahun.

Perusahaan industri di Kota Makassar tahun 2005 sebanyak 143 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 17.767 orang. Jumlah perusahaan ini tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya dimana tercatat sebanyak 143 buah dengan tenaga kerja sebanyak 17.767. Namun, dalam hal ini penulis hanya mengkonsentrasikan diri pada gambaran industri manufaktur.

1. Industri pengolahan/manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu sebagai berikut :
 - a. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.
 - b. Industri sedang adalah industri yang mempunyai pekerja 20-99 orang.
 - c. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 5-19 orang
 - d. Industri rumah tangga adalah usaha kerajinan rumahtangga yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang.
2. Klasifikasi industri pengolahan/manufaktur yaitu :
 - a. Industri makanan, minuman dan tembakau
 - b. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
 - c. Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk perabor tumahtangga.
 - d. Industri kertas dan barang-barang dari kertas atau ,percetakan/penerbitan.
 - e. Industri kimia, dan barang dari bahan kimia, karet dan plastik
 - f. Industri bahan galian bukan logam.
 - g. Industri logam dasar
 - h. Industri bahan dari logam, mesin dan sebagainya.

TABEL V. JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DAN TENAGA KERJA MENURUT KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR
Number of Manufactures, Employments, by Subdistricts in Makassar 2005

Kode Wil. Area Code	Kecamatan Subdistricts	Perusahaan Manufactures	Tenaga Kerja Employment
(1)	(2)	(3)	(4)
010	Mariso	3	158
020	Mamajang	2	325
030	Tamalate	3	172
031	Rappocini	2	89
040	Makassar	9	645
050	Ujung Pandang	4	200
060	Wajo	6	650
070	Bontoala	3	77
080	Ujung Tanah	2	560
090	Tallo	16	1.393
100	Panakkukang	17	2.049
101	Manggala	3	295
110	Biringkanaya	55	6.879
111	Tamalanrea	19	4.275
7371	Total	143	17.767

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2005
 Source : Central Board of Statistic of Makassar 2005

Dari gambaran di atas menunjukkan jumlah industri besar dan sedang yang terdapat di berbagai kecamatan di Kota Makassar pada tahun 2005 dengan disertai jumlah tenaga kerja pada masing-masing industri. Dari gambaran di atas nampak bahwa Kecamatan Biringkanaya memiliki jumlah industri pengolahan yang lebih besar yaitu 55 perusahaan industri dan memiliki tenaga kerja sebesar 6.879 orang kemudian disusul Kecamatan Tamalanrea dengan jumlah perusahaan industri 19 serta memiliki tenaga kerja sebesar 4.275 orang.

Tenaga kerja pada Industri-industri yang terdapat pada berbagai Kecamatan di Kota Makassar tersebut perlu diberdayakan, oleh karena itu pihak pemerintah yang khususnya dalam hal ini menangani industrialisasi perlu menetapkan suatu kebijakan yang mampu memberdayakan tenaga kerja pada berbagai industri tersebut.

C. INSTANSI TERKAIT DALAM KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan adanya penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dalam rangka pengaturan dan pengembangan industrialisasi di Kota Makassar.

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Departemen Perindustrian

a. Kedudukan

Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas perindustrian mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perindustrian.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas pokok dalam dinas perindustrian menyelenggarakan :

- 1) Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian.
- 2) Penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian.
- 3) Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang perindustrian.
- 4) Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian.
- 5) Pembinaan unit pelaksanaan teknis.

d. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Pertengkapan
- 3) Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a) Seksi Usaha Industri dan Bimbingan Produksi
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Industri

2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

- a. Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha industri.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan usaha industri.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian izin usaha industri dan Tanda Daftar Industri.
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan penerbitan izin usaha kawasan industri.
- 4) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan dan pengembangan kawasan industri berikat.
- 5) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengendalian dan pengawasan penerapan standar.
- 6) Penyiapan bahan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan progmosi agro bisnis dan agro industri dalam rangka peningkatan potensi pasar.
- 7) Penyiapan bahan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
- 8) Penyiapan bahan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan teknis dan peningkatan mutu hasil produksi bagi pengusaha industri.
- 9) Penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pemantauan penanggulangan pencemaran.
- 10) Penyiapan bahan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia.
- 11) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN



A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berarti memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat dan disusunlah suatu kebijakan oleh pembuat kebijakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Kebijakan merupakan suatu rencana yang ditetapkan dan dijabarkan dengan memperhatikan aspek-aspek/bidang-bidang yang terkait dan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan. Kebijakan dibuat dan disusun oleh pembuat kebijakan dan dijabarkan melalui program-program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta tuntutan-tuntutan yang berasal dari segala lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat atas, menengah, sampai ke bawah secara adil dan merata sebagai bentuk pelayanan khususnya kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan. Setelah dibuat dan disusun maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada khalayak untuk mengetahui respon balik (feed back) mengenai kebijakan yang diimplementasikan.

Apa bila kenyataannya, tenaga kerja merespon baik suatu kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilanjutkan dan ditingkatkan, tetapi

apa bila sebaliknya maka kebijakan tersebut akan di tarik dan diproses kembali oleh pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan mencari solusinya. Kemudian diadakan revisi terhadap kebijakan tersebut dan melahirkan kebijakan baru. Kebijakan yang telah direvisi itulah kemudian diimplementasikan lagi oleh implementor.

Model yang dipilih untuk menerapkan suatu kebijakan bisa saja berbeda-beda. Namun sebaiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya ketepatan kebijakan yang akan diimplementasikan, ketepatan pelaksanaannya, ketepatan target dan ketepatan lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Permasalahan implementasi bukan terletak pada model yang digunakan untuk mengimplemetasikan kebijakan, tetapi apakah tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan itu bisa tercapai secara efektif dan efisiensi atau tidak, dan apakah dengan adanya implementor itu dapat memberi manfaat bagi tenaga kerja sabagai sasaran dari kebijakan.

Mengenai implementasi kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan akan dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan hasil pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi. Tetapi sebelumnya perlu diketahui hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Kita mengenal industrialisasi sebagai proses peralihan dari satu bentuk masyarakat tertentu, menuju masyarakat industrial modern, yang dapat membedakan dengan jelas masyarakat barat yang kontemporer sebagai satu kesatuan, dengan bentuk masyarakat lain yang ada sebelumnya. Masyarakat

yang ada pada industri inilah yang di sebut sebagai tenaga kerja yang dituntut untuk dapat diberdayakan dalam rangka menuju industrial modern.

Adanya sebagian tenaga kerja yang motivasi, pendidikan dan taraf hidupnya rendah, disebabkan oleh karena mewarisi nilai hidup dari orang tua ataupun nenek moyang yang kurang mendukung tumbuhnya motivasi yang tinggi. Masih banyak nilai-nilai hidup tradisional yang terus berkembang sekalipun sudah tidak sesuai lagi, seperti hidup harus pasrah, alon-alon waton kelakon dan lain-lain. Akibatnya banyak orang tidak bergairah bekerja keras, dan lebih senang pasrah (menerima apa adanya). Dari beberapa hasil penelitian di Kota Makassar memperlihatkan bahwa tujuan orang bekerja bukan untuk memperoleh uang atau semata-mata keuntungan, melainkan untuk mencapai kesempurnaan bagi kehidupan setelah mati. Untuk membahas lebih jauh tentang implementasi kebijakan industri maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang menjadi dasar tenaga kerja yang ada pada industri tersebut.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan yang berhasil di interview. Ia mengatakan bahwa :

"Saya tamatan SMU saja. Saya masuk bekerja dalam industri ini oleh karena adanya bantuan dari salah seorang keluarga yang sebelumnya telah lama bekerja di dalam. Karena mendaftar tanpa adanya orang dalam sangat sulit." (23 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri kebanyakan hanya mengandalkan bantuan dari keluarga semata. Mereka yang bekerja hanya memiliki pendidikan yang rendah namun karena adanya keluarga yang sebelumnya telah menjadi salah seorang tenaga kerja dalam maka mereka bisa masuk tanpa adanya

penyeleksian. Tumbuhnya tenaga kerja seperti di atas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan lain yang menyatakan bahwa :

"Pada saat saya masuk sebagai tenaga kerja pada pabrik ini, pada saat itu saya baru tamat dari SMU. Karena beban orang tua yang sulit untuk menyekolahkan saya, maka saya tidak dapat melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi. Mengikuti kemauan orang tua yang sebelumnya telah bekerja pada pabrik tersebut maka sayapun diikutkan untuk bisa meringankan beban keluarga. Maka saat itu, sayapun bekerja sebagai salah satu buruh pabrik hingga saat ini." (hasil wawancara pada tanggal 23 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di tersebut dapat dilihat perbedaan bahwa tenaga kerja yang bekerja pada industri juga karena adanya pengaruh orang tua yang menginginkan anaknya untuk dapat mengikuti pekerjaan orang tua dan hal ini dilakukan sebagai bentuk balas jasa kepada kedua orang tua. Karena apabila seorang anak ingin melanjutkan sekolah dianggap sebagai suatu beban dalam keluarga. Orang tua mempekerjakan anak didasarkan pada adanya warisan dari orang tua atau nenek moyang yang sebelumnya menjadi pekerja pada industri.

Tidak jauh berbeda dari kedua pendapat informan di atas, seperti yang juga dikemukakan oleh informan yang satu ini yang mengatakan bahwa :

"Saya ayah dari 5 orang anak. Karena adanya tuntutan ekonomi yang menyulitkan kami maka saya berinisiatif untuk menjadi pekerja buruh tanpa harus melanjutkan sekolah lagi. Dan kebetulan pada waktu itu, ada salah seorang teman yang berprofesi sebagai tenaga kerja di industri. Sayapun meminta tolong untuk bisa dimasukkan sebagai tenaga kerja pada industri tersebut dan akhirnya berkat bantuannya sayapun bisa masuk dan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menghidupi keluarga." (hasil wawancara pada tanggal 23 Maret 2009)

Tidak jauh berbeda dengan informan sebelumnya yang juga mengemukakan bahwa satu cara untuk dapat menjadi seorang tenaga kerja pada industri meskipun tanpa status sekolah yang tinggi kita masih bisa masuk.

Dengan melalui salah seorang teman atau kerabat saja maka memudahkan seseorang untuk dapat secara langsung bekerja pada sektor industri tanpa harus melalui penyeleksian. Pentingnya salah seorang kerabat memudahkan seseorang untuk dapat bekerja dan mencari nafkah untuk dapat menghidupi keluarga mereka.

Berbeda dengan pendapat informan lain yang berhasil di interview ketika sedang istirahat pada salah satu industri kecil. Ia mengatakan bahwa :

"Saya telah bekerja di industri ini sudah lebih dari 5 tahun. Saya tamatan S1 pada perguruan tinggi swasta di Makassar. Saya masuk menjadi tenaga kerja di industri ini oleh karena adanya bantuan salah seorang kerabat karena pada saat itu mencari pekerjaan sangat sulit. Untungnya saya mempunyai teman yang mengajak saya untuk bekerja di industri tempat dia bekerja. Mau bagaimana lagi, daripada menganggur maka sayapun mengikuti sarannya. Pada saat saya masuk, saya cuma menulis nama sebagai salah satu tenaga kerja pada industri tersebut serta melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya dan tanpa adanya tes penyeleksian."

Dari pendapat informan tersebut dapat dikemukakan bahwa orang yang bekerja pada industri kebanyakan karena mengandalkan kemampuan orang lain. Mendaftar sebagai salah seorang tenaga kerja pada industri tidak melihat status pendidikan yang dimilikinya dan orang yang ikut melamar sebagai tenaga kerja hanya mampu menuruti keinginan dari pihak perusahaan. Selain itu karena dalam proses penyeleksian, seorang pelamar tenaga kerja tidak perlu mengikuti tes sebagaimana kemampuan yang dimilikinya melainkan hanya melengkapi berkas-berkas seperti yang diinginkan oleh perusahaan industri tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya tenaga kerja yang pertama kali masuk bekerja pada sektor industri cenderung memiliki status yang sama yaitu tenaga

kerja tanpa melihat adanya status pendidikan. Tenaga kerja yang ada kebanyakan dapat menjadi tenaga kerja industri oleh karena adanya bantuan dari sanak keluarga, teman serta adanya tuntutan dari orang tua. Hal ini juga disebabkan karena adanya pengaruh atau tradisi secara turun-temurun dari keluarga atau nenek moyang atau disebut juga sebagai suatu tradisi tradisional. Sebagai tradisi tradisional yang tumbuh telah lama dalam keluarga maka sulit untuk dirubah. Hal inilah yang biasanya mematikan motivasi seseorang untuk berkembang karena adanya tuntutan kebudayaan masyarakat yang masih berkembang.

Sesungguhnya nilai-nilai hidup tradisional tersebut yang masih dikembangkan tidak selalu bermakna negatif, tetapi orang memiliki sikap apriori dan tidak memahami kandungan makna yang sebenarnya. Antara lain seperti, makna yang dimaksud agar orang setia pada tujuan, apapun yang terjadi tetap mengusahakan sampai tujuan tersebut tercapai. Contoh lain, perlunya orang memiliki timbal rasa, prinsip ini sering diartikan sebagai sikap yang tidak berani bertindak, pada hal makna yang dimaksud agar setiap orang menghormati satu sama lain, agar terjaga juga tercipta hubungan yang harmonis, tidak saling bermusuhan.

Masyarakat yang bergerak menuju industrialisasi di samping meningkatnya jumlah spesialisasi pekerjaan juga status cenderung berdasarkan atas prestasi yang diperoleh, terutama melalui jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Hal ini terjadi berdasarkan status didasarkan atas kehidupan tradisional dari orang tua kini mulai bergeser melalui

prestasi. Artinya para orang tua tidak lagi mewariskan nilai-nilai seperti itu kepada anak-anak mereka, di mana rata-rata mereka menyelesaikan pendidikan sampai SLTA agar dapat bekerja di pabrik industri bahkan ada yang sampai pada S1. Hal yang menjadi negatif adalah seorang tenaga kerja yang menjadi tenaga kerja tidak diukur lagi berdasarkan pendidikan dan kemampuan yang dimilikinya tetapi hanya berpatokan pada kemauan untuk bekerja saja. Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan mematikan kemampuan dalam diri seseorang karena tinggi rendah pendidikan orang tersebut tetap memiliki derajat yang sama pada saat mendaftarkan diri ke perusahaan industri.

Dari konsep dasar tenaga kerja industri di atas maka selanjutnya perlu diketahui konsep secara umum yang terjadi pada tenaga kerja berkaitan dengan implementasi kebijakan industrialisasi dan salah seorang informan yang kami wawancarai sebagai tenaga kerja pada salah satu industri kecil menyatakan bahwa :

"Sejauh ini saya belum mengetahui bahwa ada kebijakan industri yang mengatur tentang tenaga kerja seperti kami ini. Yang saya tahu, saya hanya bekerja sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan menerima gaji sebagaimana waktu yang telah ditentukan." (hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masih ada seorang pekerja yang belum mengetahui secara umum tentang implementasi kebijakan industrialisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah selama ini. Mereka hanya mengerti bagaimana bekerja selama jangka waktu yang telah ditentukan dan menerima gaji sebagaimana hasil kerja mereka. Pendapat yang sama kemudian dilontarkan oleh informan lain, yang menyatakan bahwa :

"Saya telah bekerja pada dalam industri ini selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan saya belum pernah mendengar adanya kebijakan industrialisasi tentang tenaga kerja seperti kami ini, apa lagi mengetahui isi dari kebijakan itu. Yang saya tahu, saya bekerja untuk bisa menafkahi keluarga saya melalui gaji yang saya dapatkan dari industri ini." (hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa seorang pekerja industri pun yang telah lama menekuni industri selama bertahun-tahun masih belum jelas mengetahui tentang kebijakan industrialisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dari mereka, menafkahi keluarga melalui gaji yang mereka dapatkan sudah merupakan hal yang paling membanggakan dalam hidup mereka. Mengenai isi dari kebijakan industrialisasi dan implementasi, tidak perlu secara jauh diketahui oleh mereka. Bekerja dan mendapatkan penghasilan merupakan suatu kebijakan dari perusahaan yang paling baik untuk mereka.

Menurut salah satu tenaga kerja yang juga bekerja pada salah satu industri kecil lainnya, mengatakan bahwa :

"Saya bekerja pada industri ini berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tempat kami bekerja. Mulai dari jam masuk kerja hingga jam selesainya pekerjaan. Mengenai hasil yang harus diproduksi tiap bulannya hingga penghasilan yang kami terima. Mengenai kebijakan industrialisasi yang diterapkan oleh pemerintah hingga saat ini mungkin bagi kami tidak perlu terlalu tahu, karena kami juga tidak tahu apa untungnya bagi kami pekerja industri." (hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2009)

Hasil wawancara di atas lebih jelas menerangkan bahwa, kebijakan industrialisasi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah masih banyak tidak diketahui oleh pihak tenaga kerja. Kebijakan industrialisasi yang telah diimplementasikan terhadap tenaga kerja bagi tenaga kerja sendiri dianggap tidak mempunyai pengaruh yang jelas. Mereka bekerja hanya berdasarkan

aturan yang ditetapkan oleh perusahaan dan memproduksi barang berdasarkan ketentuan perusahaan bukan berdasarkan aturan dari pemerintah sendiri. Mengenai implementasi kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan tidak terlalu jauh berbeda dari pendapat tenaga kerja yang lain apakah ada pengaruhnya terhadap mereka aktivitas keseharian mereka atau tidak.

Pendapat di atas menyiratkan bahwa implementasi kebijakan industrialisasi tidak banyak diketahui oleh tenaga kerja itu sendiri, apakah mempunyai keuntungan bagi mereka atau tidak. Lain pula pendapat informan yang di interview beberapa hari kemudian. Ia menuturkan bahwa :

"Sebelum saya bekerja pada industri ini, terlebih dahulu saya mengikuti training pada BLK (Balai Latihan Tenaga Kerja Industri). Pada dasarnya hal ini dilakukan sebagai bentuk pelatihan bagi calon tenaga kerja yang secara langsung akan terjun pada industri nantinya. Mengenai pelaksanaan kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan yang telah diterapkan oleh pemerintah mungkin salah satunya adalah melalui pelatihan itu." (hasil wawancara pada tanggal 25 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa sebenarnya tenaga kerja telah diberikan fasilitas bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri mereka, hanya saja mereka belum mengetahui secara lebih jauh tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan kebijakan industrialisasi. Dan tidak sedikitnya tenaga kerja yang ada pada sektor industri mendapatkan pendidikan dan pelatihan seperti tenaga kerja lainnya. Selanjutnya pendapat yang sama juga dikemukakan oleh salah seorang pekerja yang menyatakan bahwa :

"Selama saya bekerja pada industri ini, yang saya tahu kebijakan dari perusahaan untuk kami yaitu hanya berupa pemberian JAMSOSTEK. Tapi saya tidak tahu, apakah kebijakan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja seperti kami juga diberlakukan pada industri lainnya."(hasil wawancara pada tanggal 23 Maret 2009)

Kesimpulan dari pendapat di atas tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya, yang menyatakan bahwa bagaimana pemerintah mengimplementasikan kebijakan industrialisasi. Kebijakan industrialisasi di atas, selain menyediakan lembaga untuk pendidikan dan pelatihan pemerintah juga menyediakan fasilitas lain seperti JAMSOSTEK. Hanya saja pemberian fasilitas seperti yang ada di atas, apakah terdapat pada keseluruhan industri manufaktur khususnya industri kecil/menengah yang ada di Kota Makassar atau tidak.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tenaga kerja yang bekerja pada suatu industri masih banyak yang tidak mengetahui kebijakan dari industrialisasi terhadap ketenagakerjaan itu sendiri. Tenaga kerja cenderung hanya bekerja pada suatu industri untuk mencari uang saja. Pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini adalah ketenagakerjaan yang telah diatur dalam kebijakan industrialisasi bukanlah yang menjadi prioritas bagi mereka tapi bagaimana mereka bisa bekerja dengan bantuan orang lain untuk dapat hidup. Kurangnya rasa ingin tahu para tenaga kerja industri di sebabkan karena pemerintah serta lembaga yang terkait dalam hal penyampaian kebijakan masih di anggap kurang mensosialisasikan sehingga masih banyak tenaga kerja yang tidak memahami arti penting dari kebijakan industrialisasi itu sendiri.

Bahkan menurut salah satu informan menyatakan bahwa selama ini, sangat jarang tenaga kerja yang datang untuk melaporkan tentang bagaimana peranan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja dalam rangka mensejahterahkan mereka. Apakah pemerintah memang betul-betul memikirkan para tenaga kerja yang merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam industrialisasi.

Pendapat ini senada dengan pendapat informan lainnya yang menjadi pegawai bagian umum, beliau menyatakan bahwa :

"Kami yang bekerja pada bagian umum memang sangat jarang mendapatkan tenaga kerja yang datang melaporkan atau menuntut tentang status mereka sebagai tenaga kerja pada industri." (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Pegawai umum yang bertugas melayani tenaga kerja masih sangat minim mendapatkan tuntutan dari tenaga kerja. Namun pada dasarnya sebagai pihak bagian umum mereka hanya bekerja melayani tenaga kerja sebelum masalah mereka diketahui dan selanjutnya di rujuk pada bidang yang ada pada Kantor Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sesuai dengan arah kepentingan mereka.

Ia menambahkan pula :

"Walaupun mereka ada yang datang, tugas kami hanya menghimpun atau menjadi perantara tuntutan mereka. Karena wajar sebagai tenaga kerja dapat menuntut kesejahteraan mereka. Tetapi tugas kami hanya merujuk kepada mereka untuk secara langsung datang kepada bidang industri karena secara teknis mereka yang mengaturnya." (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa tenaga kerja yang datang untuk menuntut kesejahteraan mereka tidak secara langsung dihadapkan pada bidang yang berkepentingan tetapi terlebih dahulu harus melalui bagian umum sebagai prosedur kerja dalam Kantor Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal. Ingin melanjutkan tuntutan mereka atau tidak bukan masalah bagi kami karena kami hanya bertugas menjalankan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut informan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009 mengemukakan bahwa :

"Kami selaku pihak yang berkepentingan pada berbagai masalah di bidang perindustrian tidak terkecuali tenaga kerja akan selalu melayani sebagai bentuk pelayanan publik asal melalui prosedur yang ada."

Bidang perindustrian merupakan suatu bidang yang melayani secara langsung hal-hal yang berkaitan pada masalah industri. Namun sebagai pihak yang harus taat pada aturan atau prosedur yang telah ditetapkan sehingga mereka harus mematuhi.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa :

"Kami hanya bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dari pusat. Apabila aturan dari pusat adalah seperti ini maka begitulah yang kami akan lakukan tidak terkecuali dalam melayani masyarakat harus memiliki surat pengantar yang dapat kami jadikan bukti. Lama tidaknya pengurusan dalam bidang perindustrian khususnya dalam pengelolaan kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan ini tergantung dari kemampuan kami dalam melakukan pengelolaan." (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Diharapkan dengan adanya kebijakan industrialisasi ini akan membawa perubahan yang jauh lebih baik dalam proses pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan kecepatan waktu dan lebih objektifnya implementor dalam melayani masyarakat walaupun prosedur yang ada masih belum dapat disederhanakan.

Dalam kebijakan industrialisasi dicantumkan berbagai langkah-langkah implementasi yang digunakan yang dalam hal ini ditujukan pada aspek ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :

1. Reorientasi Pengembangan SDM

Reorientasi pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu langkah kebijakan industrialisasi dimana sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja dilatih untuk memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan industri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Industrialisasi mengatakan bahwa :

"Dalam hal ini, reorientasi pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja merupakan bentuk pengenalan kembali ketrampilan-ketrampilan yang pernah diberikan yang kemudian disesuaikan untuk mengacu pada kebutuhan industrialisasi saat ini". (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa reorientasi pengembangan SDM merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam aspek ketenagakerjaan yang ditujukan sebagai perbaikan kembali tenaga kerja dalam rangka mengacu pada kebutuhan industri saat ini.



2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan

Pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja merupakan factor yang harus diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja saat ini tergolong masih rendah khususnya tenaga kerja yang ada pada berbagai industry di Kota Makassar ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Industrialisasi mengatakan bahwa :

"Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sampai dengan perguruan tinggi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah khususnya dibidang teknik. Banyaknya tenaga kerja yang ada pada industry itu, masih banyak tergolong hanya pada tamatan SMA atau sederajat yang dapat dikatakan masih memiliki kemampuan yang agak minim. Oleh karena itu, selaku pihak pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga kerja yang memungkinkan untuk disekolahkan kembali hingga ke perguruan tinggi. Hal ini pada nantinya ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli madya." (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memberdayakan tenaga kerja maka pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kejuruan untuk menghasilkan tenaga ahli madya.

3. Memperluas Infrastruktur Diklat

Memperluas infrastruktur pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk mengembangkan keahlian tenaga kerja di bidang teknik dan manajerial. Hasil wawancara kepada Kepala Bagian Perindustrian Kota Makassar mengatakan bahwa :

"Memperluas infrastruktur pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja khususnya di bidang teknik dan manajerial. Oleh karena itu berbagai sarana pendukung telah kami sediakan seperti Balai Latihan Tenaga Kerja Industri. Dalam lembaga ini tenaga kerja dapat melatih ketrampilan dalam menangani masalah-masalah teknik dalam industri." (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga telah menyediakan infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang ditujukan pada tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui BLK (Balai Latihan Tenaga Kerja Industri). Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang ditujukan untuk melatih kemampuan teknis yang dimiliki oleh tenaga kerja sebagai bentuk dalam pengembangan sumber daya manusia.

4. Meningkatkan Keterkaitan Lembaga

Pengembangan sumber daya tenaga kerja pada industri merupakan hal pokok dalam suatu kebijakan industrialisasi yang patut mendapatkan perhatian khususnya oleh Departemen Bagian Perindustrian. Terselenggaranya program pengembangan sumber daya tenaga kerja tidak hanya dapat dilakukan oleh Departemen Bagian Perindustrian saja tetapi perlu melibatkan kerja sama dengan lembaga lain sehingga program ini dapat tercapai dengan lebih baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Industrialisasi mengatakan bahwa :

"Salah satu isi kebijakan industri nasional yaitu meningkatkan keterkaitan lembaga litbang, industri serta perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi yang tepat dalam pelatihan tenaga kerja untuk industri. Berdasarkan dari apa yang dikemukakan tersebut maka kiranya lembaga-lembaga yang terkait perlu sepenuhnya ikut bekerjasama untuk menyukseskan kebijakan industri nasional yang

ditujukan pada aspek ketenagakerjaan ini." (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga yang terkait seperti lembaga litbang, industri serta perguruan tinggi perlu mendukung dan bekerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya tenaga kerja seperti yang tercantum dalam kebijakan industri nasional.

5. Meningkatkan Kompetensi SDM

Dalam rangka perbaikan kemampuan tenaga kerja maka pemerintah juga melakukan kompetensi SDM industri melalui program pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Menurut Kepala Bagian Perindustrian menambahkan bahwa :

"Sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja tidak jauh berbeda seperti pada point yang disebutkan pertama tadi. Dalam hal ini, bentuk pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan melalui kompetensi SDM industri melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan mengikuti acuan industri masa kini. Kompetensi SDM Industri dilakukan juga dengan mendayagunakan lembaga sertifikasi tenaga profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)." (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengingat kebutuhan sumber daya manusia yang selalu meningkat mengikuti perkembangan zaman maka perlu dilakukan suatu kompetensi SDM industri melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan. Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik maka pemerintah ikut mendayagunakan lembaga sertifikasi tenaga profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

6. Mengembangkan Program Diklat

Isi kebijakan industrialisasi yang keenam tidak jauh berbeda pada tujuan kebijakan industri yang terdapat pada point kedua yang menyatakan bahwa mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus di bidang teknologi, proses dan produk, teknik desain dan manajemen.

Hasil wawancara kepada Kepala Bagian Perindustrian menyatakan bahwa :

"Point keenam dalam kebijakan industri nasional tidak jauh berbeda dari maksud isi kebijakan yang terdapat pada point kedua. Hanya saja pada point ke enam, dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dikhususkan pada berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga nantinya dapat diketahui kemampuan yang mereka miliki." (hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan tenaga kerja yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja yang pada nantinya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Isi dari kebijakan industrialisasi ketenagakerjaan di atas merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang dalam hal ini tenaga kerja pada sektor industri. Serta dalam rangka menyukseskan langkah-langkah tersebut maka pemerintah perlu melibatkan lembaga-lembata lain seperti Departemen Diknas, Departemen Nakertnas, KRT, dan Perguruan Tinggi, Kementrian Koperasi dan UKM.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI

Dalam proses implementasi suatu kebijakan, terdapat indikator-indikator baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan implementasi tersebut. Indikator yang dimaksud antara lain :

1. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam pengimplementasian kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai faktor terpenting maka dalam sumber daya harus didukung oleh staf, skill, informasi, wewenang dan fasilitas.

a. Staf

Staf atau pegawai merupakan faktor terpenting yang paling mendukung dari sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan karena tanpa personil yang melaksanakan kebijakan apapun tidak akan bisa berjalan dan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Oleh karena itu ketersediaan staf sebagai salah satu pendukung sumber daya yang memadai dan berkompentensi dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan demikian pula sebaliknya.

Walaupun sumber daya manusia telah tersedia namun jika jumlahnya tidak mencukupi maka dalam pelaksanaan kebijakan apapun

tidak akan berjalan efektif. Walaupun sebenarnya jumlah sumber daya manusia dianggap bukan menjadi jaminan keberhasilan implementasi.

Menurut Kepala Bagian Perindustrian yang kami wawancarai menuturkan bahwa :

"Staf memang merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, apapun itu bentuknya. Karena yang terlibat langsung secara teknis dalam segala bentuk kebijakan adalah staff. Coba anda bayangkan apabila staff tidak ada atau tidak dilibatkan dalam pelaksanaan setiap kebijakanapakah kebijakan itu bisa berjalan atau tidak..?" (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Keberadaan staff dalam pengimplementasian kebijakan memang tidak dapat dipungkiri, karena pelaksanaan kebijakan tanpa adanya dukungan dari staff akan membuat suatu kebijakan tidak terlaksana dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan hanyalah menjadi sebuah dokumen saja.

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa :

"Apabila staf mau diandaikan....kita dapat melihat dari sebuah mobil yang begitu indah dan sangat bagus tapi tidak memiliki ban untuk berjalan. Oleh karena itu staff dapat dikatakan sebagai penggerak dari kebijakan. Dan semakin banyak jumlah staf juga akan memudahkan lebih cepatnya pelaksanaan dari setiap kebijakan." (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa peranan staff sebagai sumber daya dalam implementasi kebijakan di anggap sangat penting. Jumlah staff dalam suatu proses pengimplementasikan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan industrialisasi untuk dapat terselenggara dengan cepat, efektif

dan efisien. Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini , apakah jumlah staff yang banyak menjadi landasan utama dalam pengimplementasian kebijakan industrialisasi yang cepat, efektif dan efisien?

b. Skill

Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien. Kasus rendahnya kualitas pelayanan birokrasi saat ini dikatakan lamban dan cenderung tidak efisien. Penyebabnya bukan terletak pada kurangnya jumlah staff yang menangani pelayanan publik tersebut, tetapi lebih pada kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya motivasi staff.

Dengan demikian tidaklah cukup hanya dengan jumlah staff pelaksana yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan tetapi para staff pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki skill dalam pelaksanaan kebijakan industrialisasi ini maka Kepala Bagian Perindustrian menuturkan bahwa :

"Mengenai sumber daya manusia yang memiliki skill dalam menangani kebijakan ini juga telah tersedia. Khususnya yang memiliki pendidikan lulusan SI, S2 dan yang paling penting adalah di bidang komputerisasi. Karena pengolahan data tentang perkembangan industrialisasi, ketenagakerjaan di Kota Makassar akan mudah didapat melalui jaringan komputerisasi." (hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2009)

Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang dan tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya. Secara umum tingkat pengetahuan tentang skill pelaksana ditingkat tertentu sudah cukup baik tetapi khusus untuk staff-staff kelihatannya masih kurang. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan skill bagi implementor. Upaya dapat dilakukan berupa pemberian pelatihan secara teknis.

Lebih lanjut beliau memperjelas bahwa :

"Untuk menambah kemampuan atau skill pada staff maka kami juga mengadakan suatu pelatihan. Karena meskipun kami memiliki staff yang boleh dibilang memiliki jumlah yang cukup besar dengan jenjang pendidikan yang tinggi namun tetap kami memberikan suatu pelatihan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperlancar kemampuan yang dimiliki staff." (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan jumlah sumber daya manusia yang memiliki skill yang bagus dapat menimbulkan masalah yang pelik sehingga juga akan mempengaruhi pelayanan yang terkesan lamban dan tidak efisien. Oleh karena itu perlu adanya penambahan personil yang handal dan profesional dan personil yang ada harus tetap diberikan pelatihan dalam rangka memperlancar kemampuan yang mereka miliki.

c. Informasi

Berbicara tentang informasi maka kita akan luput dari pembicaraan tentang "hubungan". Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan karena informasi merupakan sumber pengetahuan. Ketersediaan informasi yang cukup bagi implementor sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan mendatangkan konsekuensi seperti ketidakseriusan implementor untuk memenuhi tanggungjawabnya sehingga berakibat pada ketidakefisienan.

Seperti halnya dalam pengimplementasian kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan ini perlu ada informasi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara implementor untuk melakukannya. Mengenai ketersediaan informasi ini dijelaskan sebagai berikut oleh salah satu staff pada bidang industrialisasi yang menyatakan bahwa :

"Informasi tentang pelaksanaan kebijakan industrialisasi ini sebenarnya sudah banyak kami lakukan mulai dari pemberitahuan kepada badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja hingga lembaga-lembaga yang terkait. Kami juga sudah mengaksessnya di dalam internet sebagai bahan informasi kepada setiap implementor serta masyarakat secara umum." (hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2009)

Informasi yang diterima oleh implementor mengenai pelaksanaan suatu kebijakan harus akurat, mulai dari sosialisasi tentang kebijakan industrialisasi ini sampai pada pelaksanaannya serta ketaatan personil-personil dalam menjalankan tujuan masing-masing.

• Lebih lanjut beliau menambahkan :

"Informasi yang sudah diperoleh itu saya rasa sudah cukup karena semua sudah disampaikan dengan jelas kepada semua pihak pelaksana." (hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa informasi tidak bisa lepas dari pelaksanaan implementasi Kebijakan yang melibatkan para implementor karena informasi merupakan landasan bagi setiap implementor untuk memahami dan melakukan tindakan berdasarkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu maka setiap informasi yang disajikan harus jelas dan akurat sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh personil-personil kebijakan.

d. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah adanya wewenang. Tentu saja dalam pelaksanaan suatu kebijakan dibutuhkan pendelegasian wewenang dari pejabat pembuat kebijakan kepada implementor selaku pelaksana kebijakan sama halnya dengan kebijakan ini yang pastinya mempunyai batasan kewenangan untuk menjalankannya.

Menurut pernyataan Kepala Bagian Perindustrian yang berdasarkan hasil wawancara kami menyatakan sebagai berikut :

"Untuk kebijakan industrialisasi sendiri ada pelimpahan wewenang dari pusat ke provinsi lalu ditujukan kepada setiap daerah." (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Pelimpahan wewenang merupakan hal yang mutlak karena tanpa adanya kewenangan yang diberikan dari satu instansi kepada instansi lainnya akan sangat sulit untuk menjalankan suatu kebijakan. Setiap instansi mempunyai fungsi masing-masing dan harus melaksanakan tugas-tugasnya menurut aturan yang telah ditetapkan.

e. Fasilitas

Faktor pendukung dari sumber daya yang tak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan adalah adanya fasilitas. Penyediaan fasilitas yang layak untuk mendukung implementasi yang efektif tidaklah selalu mudah karena membutuhkan selalu membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Sumber dana yang masih minim pada nantinya akan sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan salah satunya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengoperasian kebijakan industrialisasi serta untuk pengembangan ketenagakerjaan yang sangat penting adalah tempat pendidikan dan pelatihan yang dianggap masih kurang dan hal itu dapat menjadi penyebab kurang lancarnya proses pelayanan pemerintah khususnya dalam aspek ketenagakerjaan.

Selanjutnya Kepala Bidang Perindustrian yang kami telah wawancarai menuturkan bahwa :

"Fasilitas yang dibutuhkan sudah disediakan, namun meskipun fasilitas tersebut masih dianggap kurang tetapi pengadaannya akan tetap diusahakan untuk lebih memaksimalkan kinerja para pegawai serta tidak luput juga kami telah menyediakan fasilitas sarana dan prasara bagi tenaga kerja." (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai sangatlah penting bagi suksesnya pelayanan pemerintah kepada tenaga kerja sebab tidak hanya pelayanan cepat yang didambakan oleh tenaga kerja tetapi juga menyangkut faktor kenyamanan dalam menunggu sampai selesainya kebijakan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas-fasilitas untuk tenaga kerja dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja yang profesional.

Di antara pendukung sumber daya-sumber daya yang harus dimiliki oleh implementor dalam mengimplementasikan kebijakan maka sumber daya manusia yang memiliki skill dan yang mampu berkompetensilah yang paling penting karena sangat menyangkut dalam pelayanan yang baik, cepat, akurat dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi sedangkan sumber daya lainnya dapat diadakan sesuai dengan kemampuan pelaksana.



2. Struktur Birokrasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur birokrasi adalah suatu prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan di dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang dimaksudkan disini yaitu adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang lazim disebut sebagai SOP (*Standar Operating Procedures*). SOP menjadi pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Adanya prosedur memudahkan proses pencapaian tujuan karena hal itulah yang digunakan sebagai tolak ukur atau penilaian dalam proses implementasi kebijakan. Selain SOP yang menjadi pendukung di dalam struktur birokrasi juga terdapat fragmentasi.

a. S O P (*Standar Operating Procedures*).

Mengenai ketersediaan prosedur dalam implementasi kebijakan industrialisasi, maka Kepala Bagian Departemen Perindustrian yang kami wawancarai menyatakan bahwa :

"Prosedur untuk melaksanakan kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan khususnya dalam hal ini sudah ada tersedia. Sebagai bagian dari pelaksana di daerah maka kami hanya menerima pernyataan dari pusat dan tetap berpatokan pada kebijakan industrialisasi nasional. Adapun prosedurnya yaitu dimulai dari surat penetapan peraturan presiden tentang kebijakan industrialisasi nasional yang ditujukan kepada setiap provinsi. Selanjutnya, dari provinsi kemudian ditujukan kepada setiap

Departemen Perindustrian yang ada di daerah yang selanjutnya diserahkan pada perusahaan industri yang ada pada daerah tersebut." (Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Prosedur yang kelihatannya masih berbelit-belit inilah yang belum dapat disederhanakan oleh aparat birokrasi sehingga pelayanan publik terkesan sangat lamban dan tidak efisien. Untuk itu, diharapkan agar prosedur yang ada sebaiknya lebih disederhanakan lagi agar proses penyelesaian pelayanan pun lebih cepat.

Lebih lanjut beliau menambahkan pernyataan sebagai berikut :

"Prosedur yang telah saya jelaskan tadi saya rasa sudah cukup untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan ini." (Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa di dalam kesederhanaan prosedur dalam pelayanan ini hendaknya menjadi hal yang paling utama untuk diperhatikan sebab semua tenaga kerja mendambakan pelayanan yang dalam hal ini sebagai bentuk dari kebijakan yang dapat memberdayakan mereka.

b. Fragmentasi

Seperti yang telah disinggung didalam kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan tentang peningkatan keterkaitan lembaga maka pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan dukungan dan kerjasama antara instansi yang satu dengan instansi lain. Kerjasama ini dapat berupa hubungan koordinasi antara sesama instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Instansi-instansi tersebut harus



bekerjasama sebagai satu tim untuk menyukseskan kebijakan ini dengan cara menciptakan koordinasi yang baik diantara sesama implementor.

Pelaksanaan dalam kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan ini turut melibatkan beberapa instansi. Khusus untuk kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan yaitu melibatkan dinas tenaga kerja, badan usaha dan lembaga litbang lainnya. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu informan yang menjabat sebagai salah satu staff dalam bidang perindustrian yang menyatakan bahwa :

"Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan yaitu dinas tenaga kerja, badan usaha serta lembaga litbang lainnya." (hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2009)

Karena keterlibatan beberapa instansi yang sangat mempengaruhi kebijakan industrialisasi ini sehingga menciptakan sistem pelayanan yang terkesan berbelit-belit. Dikatakan demikian karena untuk pemberdayaan ketenagakerjaan saja dalam kebijakan industrialisasi membutuhkan proses yang panjang dan terkesan rumit.

Selanjutnya beliau menuturkan :

"Hubungan koordinasi dengan instansi-instansi yang terlibat seperti mengadakan suatu forum pertemuan, rapat dan diskusi serta tatap muka secara langsung agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik." (hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2009)

Semua instansi yang terkait dengan kebijakan ini hendaknya berkoordinasi secara intensif dan mengadakan pertemuan secara *face to face* untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan tersebut berhasil atau tidak berhasil dan kendala-kendala apa saja yang muncul serta

pemecahan masalahnya agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Dan akhirnya berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal ini terhadap ketenagakerjaan.

Untuk menyukseskan kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan ini sudah selayaknya para pelaksana juga mengikut sertakan tenaga kerja untuk berpartisipasi memberikan sumbangan dan pikiran serta memberikan dukungan sepenuhnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan ini kepada tenaga kerja yang ada pada setiap industri masing-masing di wilayah Kota Makassar.

3. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan industrialisasi ini mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran

Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi. Selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, informasi juga perlu didukung dengan adanya transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a. Transmisi

Proses penyampaian informasi atau transmisi antara sesama implementor menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk dalam hal ini adalah masalah petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang harus disampaikan dengan jelas agar implementor tidak salah menginterpretasikan pesan-pesan yang di terima.

Adapun interview yang kami lakukan dengan Kepala Bagian Perindustrian mengenai informasi. Beliau menuturkan bahwa :

"Penyampaian informasi mengenai tujuan dari pelaksanaan kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan ini sebelumnya telah disampaikan secara jelas apa-apa yang mesti dilakukan dan cara-cara untuk melakukannya supaya yang melaksanakan kebijakan ini nantinya juga tidak kebingungan." (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Penyampaian informasi mengenai tujuan dalam implementasi kebijakan harus dipahami dengan jelas oleh masing-masing implementor agar tidak tersedia kesalahpahaman dalam menafsirkan suatu kebijakan sehingga apa yang dilaksanakan nantinya dilapangan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa :

"Mengenai petunjuk teknis atau pelaksanaannya saya rasa juga sudah disampaikan dengan jelas kepada masing-masing implementor." (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Selain penyampaian tujuan, kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis juga sangat penting karena hal inilah yang menjadi acuan yang memperjelas informasi dalam implementasi kebijakan industrialisasi. Jika petunjuk pelaksanaan masih kabur atau masih kurang jelas, maka implementor akan salah kaprah atau lebih leluasa dalam bertindak sehingga memungkinkan apa yang dilaksanakannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang akan berujung pada ketidakefektifan tujuan dari implementasi kebijakan industrialisasi nantinya.

b. Kejelasan

Faktor penting lainnya yang mendukung penyampaian informasi adalah adanya kejelasan tujuan dan kejelasan dari informasi yang disampaikan. Sumber informasi (*komunikator*) tentunya harus menyampaikan informasi yang jelas tentang kebijakan baik yang bersifat teknis maupun operasional. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kebingungan dan deviasi antara keinginan komunikator terhadap informasi yang disampaikan karena pada akhirnya akan terjadi hubungan timbal balik dan reaksi.

Adapun pernyataan staf bidang perindustrian yaitu sebagai berikut:

"Tujuan mengenai pelaksanaan kebijakan ini saya rasa sudah jelas yaitu untuk lebih mempermudah para pelaksana kebijakan dalam mengambil tindakan." (hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2009)

Kejelasan mengenai tujuan pengimplementasian suatu kebijakan merupakan hal yang paling mendasar karena apa yang dilakukan harus sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, penting adanya kejelasan informasi mengenai kebijakan industrialisasi yang akan diimplementasikan khususnya tentang petunjuk pelaksanaan atau yang sering disebut sebagai petunjuk teknis :

Mengenai petunjuk pelaksanaan kebijakan, beliau lebih lanjut menuturkan bahwa :

"Petunjuk mengenai pelaksanaan kebijakan ini saya rasa cukup jelas dan dipahami oleh semua pelaksana dalam bertindak." (hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2009)

Dengan adanya kejelasan informasi mengenai tujuan dan petunjuk pelaksanaan dari kebijakan industrialisasi ini akan membatasi tindakan implementor agar tetap melaksanakan keputusan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan. Tujuan yang jelas dipandang sebagai tersedianya standar evaluasi dan sumber legal yang penting bagi pejabat pelaksana.

c. Konsistensi

Informasi yang disampaikan haruslah merupakan ketepatan dan pemikiran yang jelas dari tujuan dan kebijakan yang dimaksud. Karena komunikasi tidak hanya merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau sekedar hubungan antara manusia tetapi juga merupakan proses interaksi yang saling mempengaruhi maka konsistensi dan kepastian informasi yang disampaikan harus dijaga, dipertahankan serta

diusahakan dan ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi penyimpangan atau overlapping dari tujuan kebijakan yang dilaksanakan.

Mengenai konsistensi ini dijelaskan lagi oleh staf bagian perindustrian yang menyatakan bahwa :

"Perintah tentang tujuan pelaksanaan kebijakan ini memang harus tetap konsisten artinya tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya supaya tujuan dari kebijakan ini harus tetap bisa tercapai." (hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2009)

Konsistensi tujuan penting untuk dipertahankan agar implementor yang melaksanakan kebijakan tersebut juga konsisten pada keputusan dan aturan yang telah dikeluarkan.

Melanjutkan pernyataannya tadi, beliau menambahkan bahwa :

"Kalau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya harus konsisten tentunya tujuan dalam pelaksanaannya pun harus konsisten karena apa yang dilakukan nantinya harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana." (hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2009)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun suatu kebijakan telah disampaikan dengan jelas tentang tujuan dan petunjuk pelaksanaannya tetapi apa bila penyampaian tersebut tidak konsisten (selalu berubah-ubah) maka implementasi kebijakan ini tidak akan berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena implementor sebagai penerima perintah akah merasa bingung sehingga pelaksanaannya pun cenderung menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

3. Disposisi (Sikap)

Sikap dan dukungan merupakan faktor keempat yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementor dalam bertindak menyampaikan kebijakan secara efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, dalam disposisi ini harus didukung oleh persepsi dan komitmen pelaksana.

a. Persepsi

Persepsi merupakan suatu kesamaan pendapat yang ditetapkan apa bila pendapat telah searah dengan para pembuat kebijakan yang telah dibuat sebelumnya untuk ditindaklanjuti nantinya. Berikut ini adalah pernyataan dari Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah kepala bidang perindustrian mengenai disposisi tersebut. Ia menyatakan bahwa :

"Persepsi antara pelaksanaan dan pembuat kebijakan sebelum melakukan tindakan harus sama dan tidak boleh bertentangan karena suatu kebijakan tidak bisa berjalan baik tanpa kesamaan persepsi. Meskipun kami hanya bertindak di daerah tapi secara teknis kami juga adalah bagian dari pelaksana kebijakan ini." (Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Kesamaan persepsi dalam melaksanakan kebijakan ini sangat dibutuhkan agar tindakan yang dilakukan pun terbatas pada apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kesamaan persepsi akan menimbulkan kesatuan gerak dalam proses pencapaian tujuan kebijakan ini.

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa :

"Orang-orang yang terlibat sebagai pelaksana dalam kebijakan industrialisasi ini tentu saja akan bersungguh-sungguh melaksanakan kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya kepada tenaga kerja." (Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan industrialisasi perlu adanya kesamaan persepsi dari masing-masing pelaksana yaitu dari mulai dari pusat, pihak provinsi hingga ke masing-masing daerah sehingga dalam hal ini tidak ada salah satu pelaksana yang nantinya merasa tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Karena nantinya juga akan berdampak pada siapa yang menjadi objek dari implementasi kebijakan ini.

b. Insentif

Komitmen serta kesungguhan pelaksana menjalankan kebijakan ini juga sangatlah penting karena tanpa keduanya pelayanan publik tidak akan berjalan efektif sehingga kepuasan publik tidak akan pernah bisa terwujud. Yang ada hanyalah cita-cita tanpa disertai pembuktian berupa kegiatan.

Oleh karena itu para pelaksana memegang peran penting dalam implementasi kebijakan, maka usaha-usaha untuk memperbaiki mereka menjadi penting. Salah satu yang dapat dilakukan untuk itu adalah dengan memberikan insentif sebagai "bahan pemanis" seperti komentar dari Kepala Departemen Bagian Perindustrian mengenai keberadaan insentif dalam pelaksanaan kebijakan ini yang menyatakan bahwa :

"Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak bisa dipungkiri perlunya insentif demi kelancaran jalannya kebijakan. Khusus dalam pelaksanaan kebijakan ini juga telah disediakan intensifnya namun sebagai pihak yang menjalankan kebijakan kami merasa insentif yang disediakan belumlah cukup, makanya kadang-kadang tindakan yang kami lakukan secara teknis masih terdapat keterhambatan." (Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Maret 2009)

Adanya komitmen dan insentif dalam pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh karena setiap tindakan pelaksanaan membutuhkan adanya kesiapan dan kecukupan insentif sehingga dalam pelaksanaan nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu tersedianya dana yang mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan industrialisasi ini juga sangatlah penting khususnya yang ditujukan pada tenaga kerja.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan tentang implementasi kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan di Kota Makassar maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Kebijakan merupakan suatu rencana yang ditetapkan dan dijabarkan dengan memperhatikan aspek-aspek/bidang-bidang yang terkait dan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan. Kebijakan industrialisasi yang telah di buat dan disusun oleh pemerintah yang kemudian diimplementasikan masih dianggap belum optimal. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum mengenal dan mengetahui tentang kebijakan industrialisasi sehingga membuat tenaga kerja hanya bekerja untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya dan sebagian lagi bekerja untuk melanjutkan hidup. Ini sebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah secara langsung kepada tenaga kerja. Kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan hanya di buat dan ditetapkan melalui peraturan pemerintah yang selanjutnya di implementasikan melalui badan usaha serta lembaga litbang lainnya. Isi yang tercantum dalam kebijakan industrialisasi yang dibuat oleh pemerintah diimplementasikan melalui berbagai langkah-langkah yang pada intinya bertujuan untuk pengembangan sumber daya tenaga kerja.

2. Dalam proses implementasi kebijakan industrialisasi dipengaruhi oleh beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain : sumber daya, struktur organisasi, komunikasi dan disposisi (sikap). Dilihat dari indikator sumber daya, ketersediaan staf sangat berarti karena merupakan penggerak dari kebijakan. Oleh karena itu, kualitas SDM khususnya skill yang dimiliki perlu ditingkatkan misalnya melalui pelatihan. Banyaknya jumlah staf yang cukup besar tidak menjamin suatu pekerjaan dapat terselesaikan apa bila tidak ditunjang dengan kemampuan skill yang baik. Informasi yang disampaikan juga dianggap cukup jelas kepada pihak pelaksana terutama kepada badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja hingga lembaga-lembaga yang terkait. Selain itu, pelimpahan wewenang untuk kebijakan industrialisasi dari pusat lalu ditujukan ke daerah-daerah untuk dilaksanakan. Sedangkan fasilitas untuk melaksanakan kebijakan industrialisasi dianggap masih sangat kurang khususnya untuk tenaga kerja sendiri.
3. Struktur birokrasi sebagai suatu prosedur atau pola yang mengatur jalannya implementasi kebijakan industrialisasi yang lazim disebut SOP sudah ada tersedia. Namun masih dalam tahap yang rumit disebabkan karena keputusan yang akan dilaksanakan berpatokan sepenuhnya pada Peraturan Presiden dan bagian pusat. Departemen yang ada pada daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan sendiri . Selain itu, dalam implementasi kebijakan industrialisasi sendiri turut melibatkan dinas tenaga kerja, badan usaha dan lembaga litbang lainnya sebagai bentuk hubungan yang terkoordinasi secara insentif.

4. Komunikasi sebagai indikator ketiga juga sangat penting terutama menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaiannya. Penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas mengenai petunjuk pelaksanaan secara konsisten agar implementor tidak salah menginterpretasikan pesan-pesan yang diterima yang pada akhirnya tidak terlaksana sama sekali terhadap pengembangan tenaga kerja.
5. Faktor terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan industrialisasi adalah disposisi (sikap). Sikap dan dukungan merupakan faktor keempat yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementor dalam bertindak menyampaikan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, dalam disposisi ini harus didukung oleh persepsi dan komitmen pelaksana. Persepsi antara pelaksana dan pembuat kebijakan sebelum melakukan tindakan harus sama dan tidak bertentangan (berdasarkan kesepakatan bersama). Selain itu, suatu kebijakan tidak bisa dipungkiri akan perlunya insentif terutama menyangkut ketersediaan dana yang cukup. Dari keempat indikator tersebut di atas, indikator sumber daya merupakan indikator yang paling penting, terutama ketersediaan SDM yang terampil karena betapapun bagus dan sempurnanya suatu kebijakan yang dirancang oleh pembuat kebijakan, tetapi SDM sebagai pelaksana tidak mencukupi dalam segi kuantitas terlebih lagi segi kualitasnya, maka kebijakan tidak akan mampu diimplementasikan secara efektif oleh implementor.

. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai bentuk perbaikan kedepan dalam implementasi kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan. Saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Dalam proses pembuatan kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan sebaiknya juga melibatkan tenaga kerja karena tenaga kerja merupakan sumber daya terpenting dalam industrialisasi terutama dalam hal peningkatan kemampuan yang dapat dilakukan melalui program diklat sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan.
2. Pihak pelaksana kebijakan industrialisasi terhadap ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi lebih baik lagi. Karena melalui sosialisasi para tenaga kerja akan lebih mudah menanggapi dari pada dilakukan melalui suatu pemberitahuan atau media. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang secara langsung dapat memantau implementasi kebijakan industrialisasi itu sendiri di lapangan juga terhadap lembaga-lembaga yang terkait.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan perlu selalu dievaluasi terutama pada sumber daya yang merupakan indikator yang paling penting. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan kebijakan yang perlu diperhatikan. Karena belapapun banyaknya ketersediaan sumber daya manusia kalau tidak dibekali dengan skill yang memadai maka dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

4. Mungkin konsentrasi kebijakan industrialisasi ini tidak perlu pada konsep-konsep yang semuanya pasti baik, tetapi kepada menjawab pertanyaan, "bagaimana memulainya ?", agar dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memberi hasil berupa perbaikan yang nyata. Dengan demikian tenaga kerja sebagai objek utama akan pulih harapannya, bahwa akhirnya masalah-masalah dalam birokrasi ini ada tanda-tanda dan kemungkinan untuk dapat diatasi, dan akhirnya tenaga kerja kita akan menikmati pengayoman dan layanan dari pemerintah yang dapat diandalkan. Dengan implementasi kebijakan industrialisasi yang handal, sebagian dari masalah yang dihadapi bangsa kita dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin., 1997 . "Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara". Jakarta : Bumi Aksara
- A.R. Mustopadjaya . 2003 . "Latar Belakang, Tehknik dan Aplikasinya Dalam Pembangunan." Ujung Pandang : Persadi
- Adisasmita, Raharjo. 1989 . "Diklat Ekonomi I", Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Anderson, James E. 1978 . "*Public Policy Making*" . New York : Holt, Rinehart and Winston.
- _____ . 2000 . "*Public Policy Making*" . Bonton : Houghton Mifflin.
- Dye, Thomas R. 1992 . "*Understanding Public Policy*" . New Jersey : Prentice Hall
- Dunn, N William. 1983 . "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*", edisi pertama, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- _____ . 1995 . "Analisa Kebijakan Publik" (terjemahan) . Yogyakarta : Hanindita Graha Widya.
- _____ . 1999 . "Analisa Kebijakan Publik" . Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Edward III, George C. 1980 . "*Implementing Public Policy*". Congressional Quarterly Press, Washington.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2005 . "Perindustrian dan Ketenagakerjaan" . Jakarta : Fokusmedia
- Hoogerwerf, A . 1983 . "Ilmu Pemerintahan" . Jakarta : Erlangga.

- Islamy, Muhammad Irfan. 1997. *"Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara"*. Jakarta : Bumi Aksara
- Jones, Charles O. 1991 . "Pengantar Kebijakan Publik", (terjemahan). Jakarta : Rajawali Press.
- _____ . 1994 . "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 2007. "Ekonomi Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Maju 2030" . Yogyakarta : Andi.
- Kuncoro, Mudrajad, Artidiatun Adji dan Rimawan Pradiptyo (1997), Ekonomi Industri. "Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia." Yogyakarta : Widya Sarana Informatika.
- Kuntowijoyo, DR. 1985 . "Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia". Yogyakarta : Shalahuddin Press.
- Meter, Donald S. Van dan Horn, Carl E. Van . 1978 . *"The Policy Implementation Process : A Conceptual Frame Work"*. Di dalam *Administration dan Society*. Vol.6. No.4. February.
- Nugroho D, Riant . 2006 . "Kebijakan Publik, Untuk Negara Berkembang . Jakarta : PT. Elex Media Komputinodo.
- Newman, Lw. 1997 . *Social Reserch Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon. Boston.
- Pangestu, Raymond Atje, dan Julius Mulyadi (penyunting). Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta : CSIS.
- Pangestu E. 1996 . "Industrialisasi, Keunggulan Bersaing dan Era Perdagangan Bebas" dalam *Mari* . Jakarta
- Rusidi. 1993 . "Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah". Jatinangor: IKOPIN.
- Santoso . 1998 . "Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta : PT Tiara Wacana.

- Sadly, Moh., 1971 . "Ekonomi Industri". Jilid I, Bina Kawan Studi Club, Universitas Hasanuddin, Jakarta.
- Sjahrir . 1988 . "Kebijaksanaan Negara : Konsistensi dan Implementasi" . Jakarta : LP3ES.
- Syukur, Abdullah. 1987 . "Birokrasi dan Pembangunan Nasional, Studi Tentang Peranan Birokrasi Lokal Dalam Implementasi Program Pembangunan di Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin."
- _____ . 1991 . "Perkembangan Penerapan Studi Implementasi". Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2005 . "Analisis Kebijakan Publik"; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suhartono, R.B. 1981 . "Pola dan Struktur Industri Indonesia Sekitar Akhir Pelita II", Monograf Pola dan Struktur Industri Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Jakarta : Departemen Perindustrian.
- Soehartoyo. 1982 . "Penanaman Modal dan Industrialisasi", dalam CSIS, Industrialisasi dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta : *Centre for Strategic and International Studies*.
- Syafie' , Inu Kencana . 2006 . Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia . Jakarta : Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2002 . "Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Negara". Jakarta : Rajawali Press.
- Todaro, Michael P. 1996 . "*Economic Development, sixth ed., Addison-Wesley Publishing Company.*"
- _____ . 2000 . "Pembangunan Ekonomi". Penerjemah : Aris Munandar. Edisi Kelima. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Tambunan, Tulus. 2001 . "Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang". Jakarta : Ghalia Indonesia

Wibowo, Samodra . 1994 . "Konsep Kebijakan Publik" . Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Winarno, Budi. 2007 . "Kebijakan Publik"; Teori dan Proses" . Yogyakarta : Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing . Lembaran Negara Tahun 1967

Republik Indonesia. Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lembaran Negara Tahun 1970

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Lembaran Negara Tahun 1984

Republik Indonesia. Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK . Lembaran Negara Tahun 1992

Sumber Lain :

"Arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar 2009

"Bahan Nota Keuangan 1999/2000". <http://www.depperin.go.id> . 04 Januari 2009

Badan Pusat Statistik.2005. Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta Badan Pusat Statistik. Statistik Industri Besar dan Sedang. Jakarta, 2003, 1999 dan 1997.

"Gagasan NTT tentang Industri ." <http://wilmana.wordpress.com> , 02 Januari 2009

Hukum Ketenagakerjaan. "(<http://www.google.wordpress.com>)". 03 Januari 2009

"Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal".
<http://images.soemarno.multiply.com/>, 05 Januari 2009

"Industrialisasi : Antara Peran dan Kenyataan." <http://ipi.multiply.com/journal>. 03
Januari 2009.

"*Institute for Research and Empowerment (IRE)*". <http://www.irevogya.org>." 06
Januari 2009

"Kebijakan Industri". <http://www.depperin.go.id> . 11 April 2009

"Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Nasional" . [www.sekretariat negara
RI.co.id](http://www.sekretariatnegaraRI.co.id) . 03 Januari 2009

"Latar Belakang Industrialisasi Indonesia". <http://disco-phsyco.blog.friendster.com>.
05 Januari 2009

"Perkembangan Industrialisasi 2". <http://www.duto.wordpress.com>. 06 Januari 2009

Syarif, M. Laporan Penelitian tentang "Karakteristik dinamis pekerja sektor industry :
Analisis Produktivitas dan fungsi upah pekerja pada Industri udang beku di
kota Makassar ". 2007 Kendari

Soeripto. "Industrialisasi," Harian RIAU Pos. Edisi 2007.

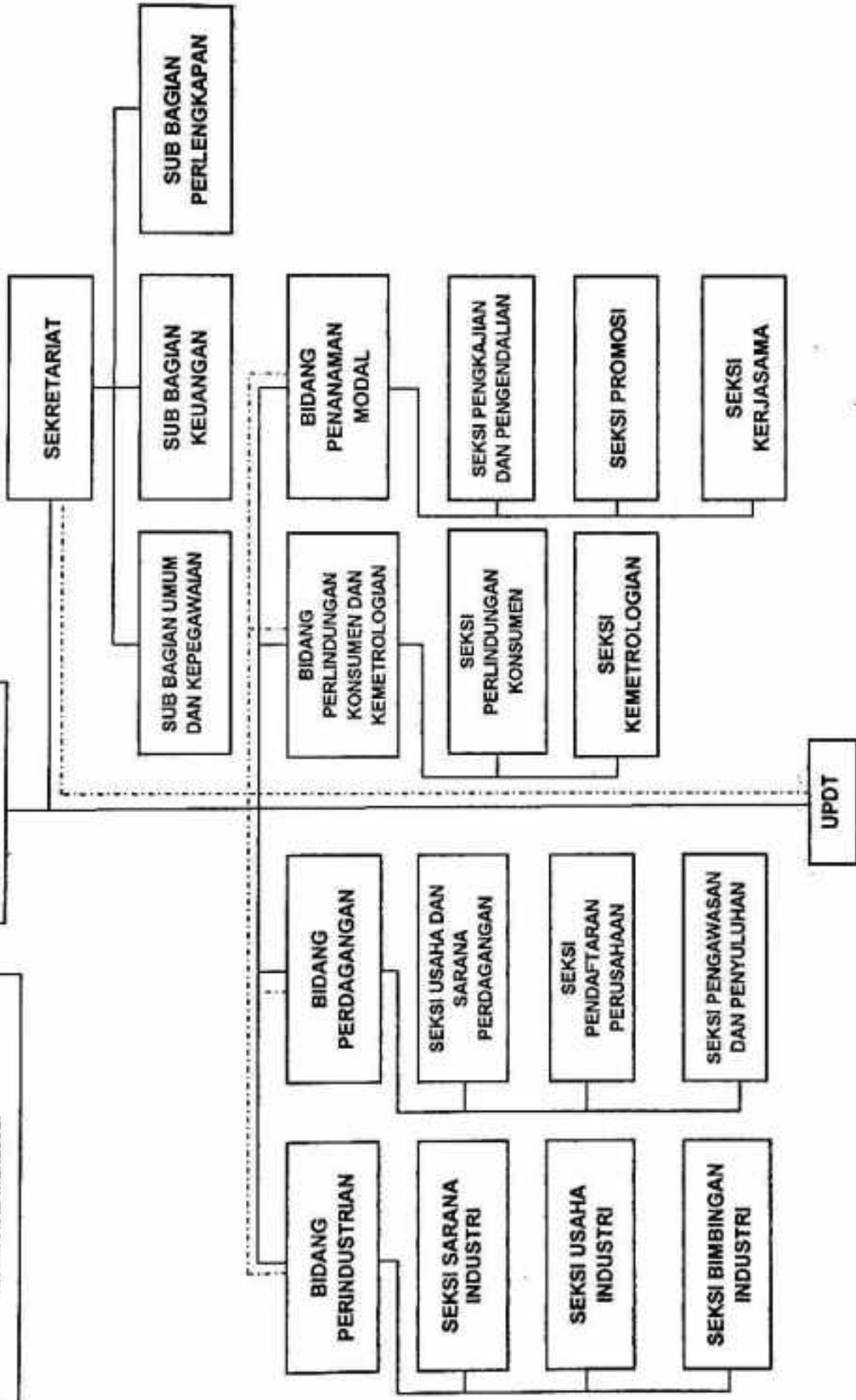
Subaharianto, Andang.. "UU Kebijakan Industrialisasi". Kompas . Edisi September
2002.

Wibowo Samodra, (1992), Laporan Penelitian Studi Implementasi Kebijaksanaan,
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lamp. : Peraturan Daerah Kota Makassar
No. : 11 Tahun 2007
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Penanaman
Modal Kota Makassar

KEPALA DINAS





SURAT KETERANGAN

No.339/ Perindag. P.Modal/IV/09

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. Hasnah Salam
Nip : 19541218 198403 2 003
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IV.b
Jabatan : Sekertaris Dinas Perindag & P. Modal Kota Makassar

Menerangkan bahwa :

Nama : SETIAWAN
STB/Jurusan : E 211 05 022/ Ilmu Administrasi
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10 Makassar

Bahwa yang bersangkutan benar telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar judul "*Implementasi Kebijakan Industrialisasi Terhadap Ketenagakerjaan di Kota Makassar*" untuk keperluan pembuatan Skripsi. Waktu pelaksanaan mulai tanggal 12 Maret s/d 12 April 2009

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 April 2009

A.n KEPALA DINAS,
Sekertaris

Dra. Hj. Hasnah Salam
Pembina Tk. I
Nip.-19541218 198403 2 003



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KANTOR KESATUAN BANGSA**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 315867 Fax +62411 – 315867
Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 12 Maret 2009

Kepada

Nomor : 070/SS3 -I/KKB/III/2009
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Yth, 1. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MAKASSAR
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN
MODAL KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 070/782/BKB-SS Tanggal 11 Maret 2009, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **SETIAWAN**
Stambuk/Jurusan : E211 05 022 / Ilmu Administrasi.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pampang 2 Lr. 2 C No. 7 Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud Mengadakan *Penelitian* dalam Wilayah / Instansi Bapak dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai hal tersebut di atas, yang akan di laksanakan selama 1 (satu) Bulan, Tmt. 13 Maret 2009 s/d 13 April 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami *menyetujui* dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.

An. WALIKOTA MAKASSAR

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
Ub
KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KOSLAN REREGA, S.STP.
Pangkat : Penata Muda Tk I
NIP : 19790521 199810 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar.
4. **Sdr. Setiawan.**
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
 MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 782 -III/BKB - SS
 Sifat : Piasa.
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Makassar, 11 Maret 2009.
 Kepada
 Yth. WALIKOTA MAKASSAR
 DI -
MAKASSAR.

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMHAS Makas-
 sar "No. 1277/PA.10.1/PL.02/2009 tgl. 5 Maret 2009,
 Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : SETIAWA
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 05 November 1985
 Jenis Kelamin : Laki laki
 Pekerjaan : Mah. FISIP UMHAS MKS.
 Alamat : Jl. Pampang 2 Lr.2 C No.7 Mks.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara
 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
 "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI -
 KOTA MAKASSAR".

Selama : 1 (satu) Bulan tmt. 12 Maret 2009 s/d 12 April 2009
 Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut
 dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DR. KARYO PERMANA
 "STRATEGIS DAERAH"
 BADAN KESATUAN BANGSA
 DRG. H. MUHTAR JUMILAH

Pangkat : Penata Tk. I

N. I. P. : 19541231 197603 1 033.

Tembusan:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta Plt.
2. Gubernur Sulawesi Selatan (sbg. Lap) di Makassar
3. Pangdam VII Wrb. di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Dekan FISIP UMHAS MKS.
6. Sdr. Setiawan.
- 7.
8. Arsip.